

BAB IV

PEMIKIRAN POLITIK MENURUT IBNU KHALDUN

A. ‘Ashabiyah (Solidaritas Kelompok)

Ketahuilah, meskipun setiap komunitas atau pemukiman dari suatu suku memiliki satu solidaritas kelompok karena memiliki garis keturunan yang sama secara umum, namun di antara mereka juga memiliki solidaritas lain berdasarkan garis keturunan secara khusus, yang membuat mereka lebih dekat dengan garis keturunan ini dibandingkan dengan garis keturunan mereka secara umum. Misalnya: Solidaritas satu klan, satu anggota keluarga, atau satu saudara seapak yang tentunya berbeda dengan solidaritas dengan satu saudara sepupu, baik yang terdekat maupun terjauh. Masing-masing dari mereka memiliki solidaritas kelompok yang lebih dekat dengan garis keturunan mereka yang terdekat dan memiliki solidaritas kelompok yang sama dengan yang lain dalam garis keturunan mereka secara umum.

Kebanggaan bisa saja terdapat dalam garis keturunan mereka yang lebih dekat dan bisa juga terdapat dalam garis keturunan mereka secara umum. Namun biasanya mereka lebih bangga dengan garis keturunan terdekat mereka karena memiliki persaudaraan sedarah yang lebih kental. Kepemimpinan di antara mereka hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki garis keturunan terdekat dan

bukan secara keseluruhan.¹²² Ketika kepemimpinan itu hanya dapat diraih dengan kekuasaan, maka solidaritas kelompok mereka yang memiliki bagian dari kepemimpinan tersebut haruslah lebih kuat dibandingkan solidaritas-solidaritas kelompok lain yang ada di antara mereka, sehingga memungkinkannya dapat menguasai dan meraih puncak kepemimpinan dengan baik. Jika poin-poin penting ini telah mereka penuhi, maka dapat dipastikan bahwa kepemimpinan atas mereka itu masih dipegang oleh mereka yang memiliki bagian khusus yang dapat menguasai mereka, sebab jika kekuasaan tersebut keluar dari kalangan mereka dan berpindah ke solidaritas kelompok yang lain diluar solidaritas mereka dalam kekuasaan tersebut, maka mereka tidak akan dapat memimpin dengan baik. Dengan demikian, bagian kepemimpinan tersebut tentulah akan terus bergulir dari garis keturunan yang satu ke garis keturunan yang lain.

Perlu diingat, kepemimpinan tersebut tidak akan berpindah kecuali kepada garis keturunan yang memiliki solidaritas kelompok lebih kuat, sebab kesatuan sosial dan fanatisme dalam masyarakat merupakan karakter alami yang membentuk kepemimpinan tersebut. Temperamen yang membentuk kepemimpinan ini tidak akan berfungsi dengan baik jika unsur-unsur dalam masyarakat memiliki kekuatan yang sama, sehingga salah satu dari unsur-unsur tersebut harus dapat menguasai yang lain.

Jika tidak demikian, maka kepemimpinan tersebut tidak akan terbentuk. Inilah rahasia mengapa harus ada kekuasaan dalam suatu solidaritas kelompok

¹²² Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*, ter. Masturi Irham dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 199.

kesukuan, yang memungkinkan dilanjutkannya estafet kepemimpinan dalam satu garis keturunan atau dalam suku tersebut.¹²³ Memimpin hanya dapat dilaksanakan dengan kekuasaan, maka seorang pemimpin harus mempunyai solidaritas kelompok yang kuat. Tanpa solidaritas kelompok, Seorang pemimpin akan sulit memperoleh legitimasi dan tidak akan dapat bertahan memimpin kelompok tersebut. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kuat atau lemahnya suatu negara itu tergantung pada perasaan solidaritas kelompok ini. Semakin tinggi ‘*ashabiyah*, maka semakin kuat pula negara tersebut. Sebaliknya, bila ‘*ashabiyah* sudah melemah, maka negara itu pun mengalami kelemahan.

Menurut Ibnu Khaldun, ‘*ashabiyah* ini timbul karena faktor-faktor pertalian darah atau pertalian kaum dan rasa cinta seseorang terhadap nasab dan golongannya. Hal ini akan menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggungan serta melahirkan kerja sama dalam berbagai bidang. ‘*Ashabiyah* juga melahirkan persatuan dan pergaulan di antara mereka. Dengan ‘*ashabiyah* ini penguasa akan memilih orang-orang yang memiliki hubungan dengan penguasa ke dalam jajaran pemerintahannya.¹²⁴

Dalam hal ini, selain poin di atas, Munawir Sjadzali menyimpulkan pandangan Ibnu Khaldun tentang solidaritas kelompok sebagai berikut:

1. Adanya solidaritas kelompok merupakan suatu keharusan bagi berdirinya suatu negara yang kuat dan besar.

¹²³ *Ibid*, hlm. 200.

¹²⁴ Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 49-50.

2. Seorang kepala negara, agar mampu secara efektif mengendalikan ketertiban negara dan melindunginya dari gangguan dan ancaman, harus memiliki wibawa yang besar dan kekuatan fisik yang kuat.
3. Negara hanya akan mampu bertahan dalam solidaritas kelompok apabila ditopang oleh agama.¹²⁵

B. Kekuasaan

Kekuasaan merupakan sesuatu yang natural bagi manusia, yang secara naluri itu cenderung hidup bermasyarakat. Naluri manusia pada dasarnya cenderung pada kebaikan daripada kejahatan dalam kedudukannya sebagai makhluk yang berakal, sebab sifat jahat manusia berasal dari unsur hewannya. Adapun kedudukannya sebagai manusia itu cenderung lebih dekat pada kebaikan. Kekuasaan merupakan bagian dari diri manusia dalam kedudukannya sebagai manusia, sebab keduanya hanya terdapat dalam dunia manusia dan tidak pada binatang. Dengan demikian, kebaikan merupakan karakter yang sesuai dengan kekuasaan.

Jika kekuasaan merupakan tujuan utama *'ashabiyah*, maka kekuasaan ini juga menjadi tujuan utama bagi cabang-cabang dan pelengkapannya, yaitu: karakter yang baik, sebab eksistensi kebesaran tanpa aksesoris pelengkapannya bagaikan eksistensi seseorang tanpa anggota tubuh atau tampil tanpa busana di hadapan masyarakat. Jika hanya memiliki *'ashabiyah* saja tanpa dihiasi dengan karakter-karakter yang baik, maka hal ini merupakan aib bagi anggota keturunan dan kedudukan. Disamping itu, kekuasaan merupakan jaminan bagi makhluk dan

¹²⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1991), hlm. 105.

pelimpahan kekuasaan Allah kepada hamba-hamba-Nya agar dapat menerapkan hukum-hukum-Nya di antara mereka. Hukum-hukum Allah pada makhluk dan hamba-hamba-Nya hanya dapat direalisasikan dengan kebaikan dan menjaga berbagai kepentingan. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam syariat-syariat-Nya, sedangkan hukum-hukum manusia terlahir dari kebodohan manusia dan tipu daya setan. Berbeda dengan kehendak Allah dan kekuasaannya, yang mencakup kebaikan dan keburukan sekaligus. Dialah Allah yang menentukan semua itu [baik dan buruk], sebab tidak ada yang mampu melakukannya selain-Nya.

Dengan kenyataan ini, maka orang yang memiliki *'ashabiyah* yang dibarengi dengan kekuasaan Allah dan dihiasi dengan karakter yang terpuji dan sesuai untuk melaksanakan hukum-hukum Allah pada hamba-hamba-Nya, maka dia telah siap untuk memegang tanggung jawab sebagai khalifah Allah pada hamba-hamba-Nya dan menjamin ciptaan-Nya, serta memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas mulia tersebut.¹²⁶ Dari keterangan ini, jelaslah bahwa karakter yang baik merupakan salah satu faktor pendorong tercapainya puncak kekuasaan bagi orang yang memiliki *'ashabiyah* yang memadai.

Jika kita melihat orang-orang yang memiliki *'ashabiyah* dan telah menguasai berbagai wilayah dan bangsa, maka kita melihat mereka berkompetisi dalam kebaikan dan menampilkan karakter-karakter yang terpuji seperti: kedermawanan, mudah memaafkan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, mau menerima dan berinteraksi dengan orang-orang yang tidak mampu,

¹²⁶ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*, ter. Masturi Ilham dkk [Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014], hlm. 227-228.

menghormati dan memuliakan tamu-tamu yang datang, membantu semua orang, memberikan mata pencaharian kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan, bersabar atas berbagai cobaan yang telah menimpa, menepati janji, mendermakan sebagian harta benda untuk menjaga harga diri dan kehormatan, mengagungkan hukum agama dengan menjalankan dan menegakkannya, memuliakan dan menaruh hormat kepada para ulama yang wara dengan keilmuannya, mengikuti petunjuk dan nasihat mereka untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya dan berbaik sangka terhadap mereka, mempercayai orang-orang yang ahli dalam agama, bertabarruk dan mengharapkan doa mereka, tunduk pada kebenaran dan menyerukannya kepada orang lain, berempati kepada orang-orang cacat dan berupaya meringankan kondisi mereka dan mengikuti kebenaran yang dinasihatkannya, bersikap rendah hati kepada orang-orang miskin, mendengar keluhan orang-orang yang meminta bantuan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan perintah agama dan aturan-aturan syariat, bersungguh-sungguh dalam beribadah dan berupaya meningkatkannya, menjauhkan diri dari pengkhianatan, penipuan, monopoli, melanggar perjanjian, dan berbagai karakter terpuji lainnya.¹²⁷

Dari sini kita mengetahui bahwa inilah etika dalam berpolitik. Jika mereka memiliki karakter-karakter terpuji ini, maka mereka layak menjadi pemimpin bagi bawahan mereka atau masyarakat pada umumnya. Kepemimpinan tersebut menjadi anugrah terbaik yang dilimpahkan Allah kepada mereka, sesuai

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 228-229.

dengan *'ashabiyah* dan kekuasaan mereka. Hal ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin bagi mereka dan bukan sesuatu yang sia-sia.

Kekuasaan merupakan pangkat yang paling sesuai dan terbaik bagi *'ashabiyah* mereka. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa Allah meridhai kekuasaan mereka dan menyerahkannya kepada mereka. Sebaliknya, jika Allah menghendaki kehancuran kekuasaan dari suatu bangsa, maka Allah menuntun mereka melakukan berbagai kejahatan, menghiasi diri mereka dengan perbuatan tercela dan membuka jalan-jalan untuk mencapainya. Dengan sikap dan perilaku semacam ini, maka keutamaan-keutamaan terpuji dalam berpolitik hilang dari mereka. Kondisi semacam ini akan terus berlanjut hingga kekuasaan tercabut dari diri mereka dan menggantikannya dengan bangsa lain, sebagai peringatan kepada mereka atas terampasnya semua anugrah dan berbagai kenikmatan yang dilimpahkan Allah kepada mereka.

Ketahuilah, di antara karakter-karakter keagungan dan kesempurnaan yang diperebutkan berbagai kabilah yang memiliki *'ashabiyah* dan menjadi faktor pendorong mereka untuk mencapai kekuasaan adalah menghormati dan memuliakan para ulama, orang-orang saleh, orang-orang terhormat yang memiliki pangkat dan kedudukan, para saudagar, orang-orang asing, dan menempatkan setiap orang sesuai tempat dan kedudukannya.¹²⁸ Hal ini karena penghormatan berbagai kabilah, kelompok-kelompok *'ashabiyah* dan kesukuan kepada semua orang yang mendukung mereka dan menyambung tali kekeluargaan dan *'ashabiyah*, serta berperan serta membantu memperluas

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 229-230.

kebesaran dan kekuasaan mereka itu merupakan sesuatu yang natural dan dilandasi oleh keinginan untuk mendapatkan pangkat, sebab perasaan takut dengan kaum yang dihormati, ataupun harapan mendapatkan perlakuan serupa darinya.

Adapun orang-orang yang tidak memiliki '*ashabiyah*' yang ditakuti dan kedudukan yang dapat diharapkan, maka kemuliaan mereka akan diragukan. Tampak tujuan mereka dalam menggapai kekuasaan tersebut hanya untuk kebesaran atau kesombongan dan menghiasi diri dengan karakter-karakter kesempurnaan, dan siap memasuki politik praktis tanpa memperdulikan kebenaran, sebab menghormati teman koalisi dan rival politik merupakan sikap yang penting dilakukan terutama dalam politik yang sifatnya khusus: antara kabilahnya dan kompetitornya, memuliakan tamu-tamu agung dan bermalam di kediamannya.

Karakter-karakter khusus ini merupakan kesempurnaan dalam kehidupan berpolitik secara umum. Orang-orang saleh dan ahli agama dibutuhkan untuk mendirikan atau menegakkan simbol-simbol keagamaan dan syariat. Para saudagar dibutuhkan untuk mendorong terjadinya regulasi komoditi perniagaan yang mereka bawa sehingga memberikan manfaat dalam masyarakat. Orang-orang asing dengan kemuliaan etika dan menghormati mereka sesuai tempat dan kedudukannya merupakan sikap toleran. Sifat-sifat semacam ini merupakan sikap yang toleran dan berkeadilan.

Apabila seseorang dalam suatu *'ashabiyah* menghiasi diri dengan karakter-karakter terpuji semacam ini, dapat diketahui bahwa mereka sedang berupaya mencapai puncak politik secara umum, yaitu kekuasaan. Allah meridhai keberadaan karakter-karakter tersebut pada diri mereka lewat tanda-tanda yang dapat kita lihat, oleh karena itu, apabila Allah menghendaki tercabutnya kekuasaan dan pemerintahan dari suatu kaum yang berkuasa, maka yang dapat kita lihat dan akan hilang pertama kali adalah sejauh mana mereka memuliakan orang-orang tersebut [para ulama dan lain-lainnya]. Apabila penghormatan tersebut telah hilang dari suatu bangsa, maka ketahuilah, nilai-nilai keutamaan dan kearifan telah mulai menghilang dari mereka, yang lalu diikuti dengan hilangnya kekuasaan dari mereka.¹²⁹

C. Beberapa Karakter Dasar Kekuasaan

a. Menikmati Sendiri Kebesarannya

Kekuasaan dapat berdiri tegak dengan dukungan *'ashabiyah*. Suatu *'ashabiyah* dapat terbentuk dari beberapa *'ashabiyah*, dimana satu di antaranya lebih kuat dari yang lain. Dengan keutamaan ini, maka *'ashabiyah* yang lebih kuat dapat menguasai *'ashabiyah* yang lain dan mengendalikannya hingga semua *'ashabiyah* bergabung dengannya. Gabungan *'ashabiyah* ini akan menyatukan kekuatan dan mampu mengalahkan bangsa dan kerajaan lain. Rahasia dibalik semua ini adalah bahwa *'ashabiyah* umum dari suatu kabilah bagaikan ramuan yang membentuk sesuatu. Ramuan pada dasarnya berasal dari beberapa unsur. Apabila unsur-unsur tersebut melebur menjadi satu secara berimbang, maka

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 230-231.

tidak ada percampuran sama sekali, yang ada hanyalah satu kesatuan. Di antara unsur-unsur tersebut terdapat unsur yang menguasai semua unsur yang ada hingga berhasil mengumpulkan dan menyatukannya, dan membentuknya menjadi satu ‘ashabiyah baru. ‘ashabiyah ini mencakup seluruh ‘ashabiyah. ‘Ashabiyah yang terkuat itu menjadi bagian dari ‘ashabiyah tersebut. Itulah ‘ashabiyah yang terbesar.

Dalam suatu bangsa pasti terdapat rumah nasab yang di dalamnya terdapat sosok yang mempunyai bakat memimpin. Salah satu dari mereka harus menjadi pemimpin yang menguasai mereka. Dengan demikian, seluruh ‘ashabiyah yang ada harus mengangkat seorang pemimpin, dimana persemaiannya mampu menguasai yang lain. Apabila seorang pemimpin telah diangkat, maka watak kehevanannya akan melahirkan kesombongan dan keangkuhan.

Ketika kesombongan telah menyusup dalam dirinya, maka dia akan menolak untuk membagi kekuasaan dalam menundukkan dan mengontrol mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, sikap semacam ini akan menumbuhkan kesombongan hingga mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ini merupakan penyakit yang menjangkiti karakter manusia pada umumnya. Sikap otoriter seorang penguasa dibutuhkan ketika seluruh elemen bangsa mengalami kerusakan, beda halnya jika dalam kerajaan tersebut terdapat beberapa penguasa. Oleh karena itulah, superioritas ‘ashabiyah kekuasaan harus dibatasi, yang diimbangi dengan pelemahan ‘ashabiyah yang lain agar tidak mengacaukan rezim yang berkuasa. Pemimpin ini akan menikmati sendiri kekuasaannya

dengan semaksimal mungkin tanpa membiarkan seorangpun ikut merasakannya, baik unta ataupun kuda (yang menjadi bagian dari sesuatu yang dapat dinikmati). Dengan begitu, ia menikmati kebesaran tersebut secara total dan menjauhkan mereka untuk ikut merasakannya. Kondisi ini biasanya dapat dicapai oleh penguasa pertama dari suatu pemerintahan, sedangkan penguasa kedua tidak dapat mencapainya kecuali jika penguasa kedua dan ketiga memiliki kekuatan ‘ashabiyah yang mampu melindungi dan mempertahankannya. Proses semacam ini pastilah terjadi dalam sebuah kerajaan.¹³⁰

b. Hidup Mewah

Apabila suatu bangsa berhasil menguasai dan merampas kekuasaan penguasa sebelumnya, maka kekayaan dan kemakmurannya akan bertambah. Kekayaannya akan semakin melimpah dan mereka pun dapat melewati penderitaan hidup dan keprihatinannya menuju kehidupan yang megah, mewah, dan penuh keindahan. Mereka akan terdorong untuk mengikuti jejak para pendahulu mereka dari segi kekayaan dan gaya hidup. Sikap hidup semacam ini akan menjadikan kemewahan dan keamanan hidup menjadi sesuatu yang harus dipenuhi. Tidak heran jika mereka bermewah-mewah dalam memenuhi kebutuhan makan, pakaian, bejana, dan berbagai kebutuhan glamour lainnya. Mereka sengaja bermewah-mewah dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut dan bahkan mengikuti gaya hidup bangsa-bangsa lain yang serba mewah, seperti: makanan yang lezat, pakaian yang bagus, dan kendaraan mewah.

¹³⁰ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*...hlm. 281-282.

Generasi-generasi sesudah mereka berupaya mengimbangi pendahulu mereka, hingga seluruh pemimpin kerajaan mengikutinya. Berdasarkan besar kecilnya kekuasaan mereka, maka sebesar itu pula keberuntungan dan kemakmuran yang dapat mereka nikmati. Kondisi ini terus berlanjut hingga mencapai puncaknya, dimana kerajaan telah mencapai batas kemampuannya berdasarkan kekuatan dan kemakmuran penguasa sebelumnya.¹³¹

c. Hidup Tenang dan Bermalas-malasan

Apabila seorang penguasa lebih memilih ketenangan dan bersantai dalam sikap dan perilaku, maka sikap semacam ini akan menjadi karakter dan watak mereka, layaknya kemakmuran pada umumnya. Generasi-generasi mereka berikutnya akan dibesarkan dalam kemewahan hidup, bersenang-senang, dan bermalas-malasan. Dengan sistem pendidikan dan gaya hidup seperti ini, maka perilaku liar mereka akan berubah kemudian mereka akan melupakan sisi-sisi positif hidup primitif, yang dengannya kekuasaan dapat ditegakkan karena sifat kepahlawanan dan pemberani. Kebiasaan merampok, kemampuan menguasai kehidupan di padang pasir, dan ketangkasan berperang telah mereka tinggalkan. Akhirnya, mereka tiada bedanya dengan penduduk yang hidup menetap dan berperadaban kecuali dalam kebudayaan dan simbol-simbol kehormatan belaka. Kekuatan mereka melemah, keberanian menjadi hilang, dan sifat keras mereka terkikis. Hal ini akan menjadi bencana bagi kerajaan dan akan terancam runtuh.

¹³¹ *Ibid*, hlm. 283.

Mereka senantiasa menghiasi hidup mereka dengan sikap bermewah-mewah, bermalas-malasan, lemah, dan tidak bersemangat dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Mereka tenggelam dalam kenikmatan hidup yang menjauhkan mereka dari kehidupan primitif dan liar. Mereka berupaya melepaskan diri dari semua itu secara bertahap, seraya melupakan patriotisme dan kepahlawanan yang menjadi pelindung dan kekuatan mempertahankan diri. Jika kondisi masyarakat dan penyelenggara kerajaan sudah sedemikian lemah, maka kerajaan tergantung pada kekuatan militer bangsa lain jika kerajaan mempunyai kemampuan untuk membiayainya.

Terkadang terjadi pada suatu kerajaan, apabila berada di ambang kehancuran karena gaya hidup yang bermegah-megah dan bermalas-malasan, maka para penguasa atau pengelola kerajaan memilih beberapa pendukung dan pembantu-pembantunya dari luar kelompok mereka, yaitu: mereka yang masih bergaya hidup liar untuk dijadikan sebagai personel militer, yang lebih tahan berperang dan lebih mampu menahan penderitaan yang diakibatkannya, seperti: kelaparan dan kehidupan yang keras. Kebijakan ini dapat dijadikan sebagai penghambat laju kerajaan menuju keruntuhannya, hingga Allah SWT benar-benar menghendaki kehancuran kerajaan tersebut.

Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kerajaan Turki di belahan Timur, dimana sebagian personel militernya itu merupakan para bekas hamba sahaya yang memiliki loyalitas. Penguasa Turki memilih mereka sebagai personel militer, baik untuk pasukan kavaleri maupun infantri. Mereka lebih tahan di medan perang dan menempuh kehidupan yang keras, dimana sebelumnya

mereka dibesarkan dalam kenikmatan, kekuasaan, dan dibawah perlindungan penguasa. Hal yang sama juga terjadi pada pemerintahan Al-Muwahhidun di Afrika, dimana para penyelenggara kerajaan lebih banyak mengambil personel militernya dari kalangan Zanatah dan Arab, seraya mengabaikan warga masyarakat yang terbiasa hidup mewah. Dengan upaya ini, maka kerajaan berhasil memperpanjang usianya hingga selamat dari keruntuhan.¹³²

D. Khalifah [Penguasa]

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa adanya khalifah itu adalah ciri yang membedakan manusia dari makhluk lain di alam semesta ini. Setiap manusia sudah pasti memerlukan khalifah, karena dalam diri manusia itu masih tersisa sifat-sifat kebinatangan dan kecenderungan untuk menganiaya orang lain [al-zhulm]. Seandainya khalifah itu tidak ada, kehidupan manusia akan berada dalam keadaan kacau-balau dan penuh dengan situasi anarki yang pada akhirnya akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Jadi bagi Ibnu Khaldun, khalifah bukan orang yang memaksakan kehendaknya kepada orang lain, akan tetapi seseorang yang melakukan suatu tugas sosial yang penting, yang tujuannya itu berkaitan erat dengan kelanjutan eksistensi manusia itu sendiri.

Kepentingan rakyat pada khalifah itu bukan pada diri dan tubuhnya, seperti: keelokan bentuk badannya, kecantikan wajahnya, kebesaran tubuhnya, luas ilmu pengetahuannya, indah tulisannya, atau kecerdasan otaknya. Kepentingan mereka itu terletak dalam hubungan antara dia dan mereka, oleh

¹³² *Ibid*, hlm. 287-288.

karena itu kekuasaan dan khalifah itu termasuk hal yang bersifat relasional [*min al-umur al-idhafiyyah*]. Jadi terdapat keseimbangan antara kedua belah pihak. Dia dinamakan khalifah karena ia mengurus persoalan rakyat. Khalifah adalah seseorang yang mempunyai rakyat, sedangkan rakyat adalah mereka yang memiliki khalifah.¹³³

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa bagi Ibnu Khaldun sebenarnya tidak ada suatu hal yang khusus, yang terdapat pada diri khalifah, selain bahwa ia dipercaya rakyat untuk mengurus mereka. Kepentingan yang dimilikinya bukan karena sesuatu hal luar biasa yang terdapat dalam dirinya, akan tetapi karena rakyat mempercayakan kepadanya untuk mengurus urusan mereka. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa baik-buruknya seorang khalifah itu sangat tergantung pada bagaimana cara ia mengurus kepentingan rakyat tersebut. Apabila kekuasaannya itu dilaksanakan dengan lemah lembut, semua pihak, termasuk khalifah dan rakyat, akan berada dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sedangkan apabila kekuasaan itu dilaksanakan dengan kekerasan, penindasan, serta selalu mencari kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan rakyat, maka rakyat akan diselimuti oleh rasa ketakutan dan merasa tertindas.

Dalam keadaan seperti ini, sifat yang berkembang di kalangan rakyat adalah sifat suka berdusta dan tidak mengatakan apa yang sesungguhnya. Penipuan dan kebohongan merupakan ciri yang tersebar luas di tengah masyarakat. Khalifah sama sekali tidak dapat mengandalkan diri kepada rakyat, terutama

¹³³ Abdul Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, [Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992], hlm. 190-191.

dalam menghadapi krisis dan peperangan. Mereka akan menjadi senjata makan tuan bagi khalifah, karena rakyat akan menjadi pengkhianat dan meninggalkannya dalam keadaan perang. Malah mungkin juga bahwa mereka akan berbuat makar untuk membunuh khalifah itu. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa seorang khalifah yang baik itu adalah seseorang yang berada di tengah rakyat, serta berlaku baik dan lemah lembut terhadap mereka. Dengan demikian, rakyat akan menyayangnya serta akan mempertahankannya sampai tetes darah penghabisan dalam memerangi musuh-musuhnya.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kekerasan dalam melaksanakan kekuasaan itu biasanya bersumber pada kecerdasan otak khalifah itu. Otaknya yang terlalu cerdas itu membuat pandangannya terlalu jauh ke depan.¹³⁴ Khalifah seperti itu menghendaki rakyat melaksanakan rencana-rencananya yang berjangka panjang, sehingga sangat memberatkan rakyat. Berdasarkan kenyataan itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa seorang khalifah itu jangan terlalu pintar. Menurut Ibnu Khaldun, salah satu kaidah bagi seorang khalifah itu terdapat dalam sebuah hadis: Rasulullah SAW bersabda: Berjalanlah sesuai dengan langkah orang yang terlemah di kalangan kamu. Jadi khalifah yang terbaik itu bukanlah yang paling pintar, akan tetapi yang bersifat pertengahan, karena sifat seperti itulah yang sangat terpuji.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa khalifah itu adalah seorang manusia biasa yang lemah, sama keadaannya dengan orang-orang lain. Perbedaannya adalah karena dia memikul beban yang lebih berat. Oleh karena itu, ia

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 191-192.

memerlukan bantuan dari orang lain. Ia membutuhkan tentara yang akan melindunginya dari musuh-musuhnya juga membutuhkan orang-orang yang akan menjalankan roda pemerintahan, oleh karena itu ia membutuhkan kementerian, pengawal, bagian administrasi dan perpajakan, bagian surat-menyurat, kepolisian, angkatan laut dan lain sebagainya. Semuanya ini dimaksudkan untuk membantunya dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah tersebut.

Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik di tengah masyarakat, khalifah harus memiliki beberapa perangkat fasilitas dan hak yang dapat membantunya dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Di antaranya adalah dominasi [al-ghalabah], pemerintahan [as-shulthan] dan kekuasaan untuk melakukan kekerasan [al-yad al-qahirah]. Semuanya ini dipergunakan untuk mencegah agar sampai terjadi perselisihan dan kesewenang-wenangan dalam masyarakat, sebagai akibat dari sisa-sisa kebinatangan dan kecenderungan untuk berbuat aniaya di antara sesama manusia, kalau sampai terjadi hal itu, maka tugasnya adalah untuk menyelesaikannya.¹³⁵

Adapun syarat untuk menduduki jabatan sebagai penguasa:

1. Mempunyai pengetahuan yang luas: seorang khalifah diharuskan mempunyai ilmu pengetahuan, hal itu sudah jelas, sebab dia bertanggung jawab dalam menerapkan hukum-hukum Allah jika mengetahuinya, sedangkan orang yang tidak memahami ajaran agama dan hukum-hukum Allah, maka tidak boleh diangkat sebagai penguasa. Seseorang belum bisa dikatakan sebagai orang

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 192-193.

yang berilmu kecuali sudah mencapai tingkatan mujtahid, sebab bertaklid merupakan sifat minus. Sedangkan kepemimpinan atau Imamah menuntut kesempurnaan dalam berbagai karakter dan perbuatan.

2. Adil: khalifah merupakan jabatan keagamaan yang harus mengontrol jabatan-jabatan lain yang juga mengharuskan kriteria keadilan ini, sehingga hal ini lebih diutamakan. Para ulama bersepakat bahwa sifat keadilan ini tidak dimiliki oleh orang fasik yang terbiasa melakukan perbuatan terlarang dan sejenisnya.
3. Kompetensi: syarat kompetensi merupakan keharusan karena seorang khalifah harus berani menegakkan hukum dan mendeklarasikan perang dengan pertimbangannya yang cermat hingga dapat memutuskan kapan ia harus memobilisasi pasukannya untuk berperang, memahami *'ashabiyah* dan strategi perang juga mampu menghadapi krisis politik dan segala konsekuensinya. Dengan kompetensinya ini ia layak menduduki jabatan tersebut, sehingga mampu menjaga agama, memerangi musuh, menegakkan hukum-hukum Allah, dan mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum.
4. Sehat jasmani dan rohani: bebas dari penyakit gila, buta, dungu, dan tuli, serta segala cacat fisik yang berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, seperti kehilangan kedua tangan, kedua kaki, dan lainnya. Semua itu disyaratkan karena berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya. Bahkan, ia juga harus bebas dari cacat yang mengganggu pemandangan saja misalnya, seperti: kehilangan salah satu

anggota tubuh. Dengan demikian, syarat jasmani dan rohani ini merupakan syarat kesempurnaan.

Ketidakebasan bertindak dapat disamakan dengan orang yang mengalami cacat fisik. Kekurangan ini dibagi menjadi dua macam: salah satunya bersifat wajib dan dapat disamakan dengannya (tidak boleh menjadi pemimpin) seperti paksaan dan ketidakmampuan bertindak secara keseluruhan karena berada dibawah tekanan atau sejenisnya. Satu bagian lagi berbeda kategori dengan yang pertama, yaitu paksaan karena penguasaan beberapa orang yang mendukungnya tanpa unsur pembangkangan atau ketidakpatuhan. Dengan demikian, maka kekuasaan berpindah pada orang yang merebutnya. Jika dia menjalankan kekuasaannya berdasarkan syariat, berkeadilan, dan memiliki kebijakan politik yang baik, maka keputusan yang diambilnya boleh dipatuhi. Jika tidak demikian, maka kaum muslimin hendaknya mendukung orang yang dapat menghentikan kekuasaannya dan menghapuskan situasi dan kondisi yang tidak sehat tersebut hingga kekuasaan khalifah pulih kembali.¹³⁶

E. Kedudukan Lembaga-lembaga Keagamaan dalam Sistem Khilafah

Khalifah merupakan wakil Pemilik Syariat (Allah) dalam menjaga agama dan politik atau urusan dunia, maka pembawa syariat berkewajiban menangani dua urusan sekaligus. Adapun dalam urusan agama, maka berdasarkan *taklif-taklif* syariat yang harus disampaikan dan mendorong manusia untuk menaatinya, sedangkan dalam urusan duniawi, maka berdasarkan perlindungan yang dapat

¹³⁶ Ajat Sudrajat, *Sejarah Pemikiran Dunia Islam dan Barat*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm. 40-41.

diberikan untuk menjaga kepentingan-kepentingan mereka dalam membangun peradaban manusia. Kekuasaan duniawi tersebut akan berjalan lebih sempurna jika didasarkan pada hukum-hukum syariat, sebab pemilik syariat lebih mengetahui tentang kemaslahatan-kemaslahatan tersebut. Dengan demikian, maka kekuasaan duniawi berada dibawah koridor sistem kekhalifahan, jika berdasarkan Islam dan ajaran-ajarannya, dan berdiri sendiri (tidak berada dibawah kekhalifahan) jika tidak berdasarkan syariat Islam. Bagaimanapun juga, kekuasaan duniawi memiliki tingkatan ke bawah dan lembaga-lembaga yang berada dibawah kekuasaannya yang mengharuskan adanya perencanaan, dimana lembaga-lembaga tersebut dipercayakan kepada para pegawai pemerintahan. Dengan begitu, masing-masing pegawai dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan pengangkatan penguasa yang membawahi lembaga-lembaga yang mereka pimpin. Dengan penunjukan dan pengangkatan pegawai ini, maka urusan dan kekuasaannya dapat berjalan dengan baik.

Adapun jabatan kekhalifahan, meskipun kekuasaan dunia berada dibawah naungannya maka pengurusan masalah keagamaan memiliki kelembagaan dan tingkatan-tingkatan tertentu yang tidak dikenal kecuali dalam kekhalifahan Islam. Lembaga-lembaga keagamaan yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat seperti: shalat, fatwa, pengadilan, jihad, dan pengawasan pasar, semuanya berada dibawah naungan sistem *Imamah Al-Kubra* [Kepemimpinan tertinggi], yaitu khilafah.

- a) Shalat: kepemimpinan dalam shalat memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada semua lembaga dan bahkan lebih tinggi dibandingkan kekuasaan

duniawi, terutama bagi kekuasaan duniawi yang sama-sama berada dibawah naungan kekhalifahan. Pernyataan ini didukung oleh konklusi dari pernyataan para sahabat mengenai Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang mendapatkan mandat resmi Rasulullah SAW untuk menggantikan Beliau sebagai imam sholat dan tidak menggantikannya dalam kekuasaan politik.¹³⁷ Mereka menanyakan, “Rasulullah SAW merestuinnya untuk memimpin agama kita, tidakkah kita merestuinnya untuk memimpin kita dalam urusan dunia kita?”. Kalaulah shalat tidak lebih tinggi kedudukannya disbanding kekuasaan politik, maka kita tidak dapat menganalogikannya. Jika memang demikian, ketahuilah bahwa masjid terbagi dalam dua jenis:

1. Masjid agung atau masjid raya yang memiliki banyak pengurus dan sengaja dipersiapkan untuk mengerjakan shalat-shalat lima waktu dan lain-lainnya.
2. Masjid yang didirikan kaum muslimin secara umum yang berada dibawah dan dimiliki masing-masing warga di daerah, bukan untuk shalat secara umum.

Adapun masjid-masjid raya, maka kepengurusannya menjadi tanggung jawab khalifah atau orang yang mendapat mandat dari penguasa atau menteri atau hakim agung, sehingga ia berhak menjadi imam shalat, baik shalat lima waktu, shalat jumat, shalat kedua hari raya, shalat dua gerhana, dan shalat Istisqa'. Pengangkatan imam ini hanyalah prioritasnya dan untuk kemaslahatan yang lebih baik agar rakyat tidak tercerai-berai dalam memandang kepentingan-kepentingan

¹³⁷ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*, ter. Masturi Irham dkk [Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014], hlm. 390-391.

mereka secara umum. Adapun mengenai masjid-masjid yang dibangun secara khusus oleh suatu kaum atau daerah, maka kepengurusannya diserahkan kepada masyarakat setempat dan tidak membutuhkan pandangan khalifah.

Ketika karakter umum kekuasaan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya itu masuk dalam diri manusia, seperti: mudah marah, sombong dan enggan berinteraksi dengan masyarakat umum, baik dalam urusan dunia maupun agama mereka, maka mereka menunjuk orang lain untuk menggantikannya menjadi imam shalat. Hanya sesekali mereka menjadi imam shalat, seperti shalat-shalat wajib, shalat dua hari raya, dan shalat jum'at. Sifat semacam ini banyak dimiliki oleh para khalifah dari Bani Abbasiyah dan Al-Ubaidi pada permulaan pemerintahan mereka.

b) Fatwa: seorang khalifah harus memilih para ulama, orang-orang terpelajar, dan orang-orang yang ahli, dalam memberikan fatwa yang mempunyai kompetensi untuk menduduki jabatan tersebut, sebab fatwa bersentuhan langsung dengan kepentingan kaum muslimin secara umum dalam urusan keagamaan mereka, sehingga harus dijaga agar jabatan tersebut tidak dikuasai orang yang tidak berkompeten dalam bidang tersebut sehingga akan menyesatkan banyak orang. Orang yang terpelajar itu mempunyai tugas dan kewajiban mengajarkan dan menyebarkan luaskan ilmunya, serta mendirikan pengajian di masjid-masjid. Apabila di masjid-masjid raya, yang kepengurusannya berada dibawah tanggung jawab para penguasa, maka harus memiliki izin terlebih dahulu. Sedangkan apabila di masjid-masjid yang dibangun dengan swadaya dan dikelola masyarakat setempat, maka hal itu

tidak memerlukan izin penguasa, namun para guru dan ahli fatwa hendaknya mempunyai kontrol diri yang mencegahnya melakukan hal-hal yang tidak diketahuinya sehingga dapat menyesatkan orang yang ingin mendapatkan petunjuk dan bimbingan. Para penguasa harus memberikan perhatian terhadap semua perkara yang menjamin kepentingan umum, dengan memberikan izin ataupun membatalkannya.

- c) Pengadilan: pengadilan termasuk lembaga yang berada dibawah kekhalfahan, sebab pengadilan merupakan jabatan yang bertugas menyelesaikan konflik yang terjadi antar warga dan mencegah terjadinya konflik, dengan catatan harus berdasarkan hukum-hukum syariat yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka pengadilan merupakan bagian dari kekhalfahan dan dibawah naungannya. Para khalifah terkemuka pada permulaan Islam, menjalankan fungsi dan tugas pengadilan sekaligus, selain disamping jabatan khalifah yang disandangnya, tanpa mengangkat orang lain untuk mendudukinya.¹³⁸

Mereka melimpahkan tugas pengadilan kepada orang lain meskipun pada dasarnya merupakan bagian dari tugas khalifah karena mereka disibukkan dengan tugas-tugas politik secara umum, banyak berjihad dan melakukan penaklukan ke berbagai wilayah, menjaga benteng pertahanan, dan membela tanah air. Tugas-tugas tersebut tidak mungkin dijalankan sendiri mengingat arti pentingnya pengadilan bagi masyarakat. Para khalifah berupaya mempermudah proses pengadilan di masyarakat dengan melimpahkan jabatan tersebut kepada orang

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 392-393.

lain, selain untuk meringankan tugas-tugas kerajaan. Meski demikian, mereka tidak melimpahkan tugas-tugas pengadilan tersebut kecuali kepada pendukung *'ashabiyah*-nya, baik karena hubungan garis keturunan ataupun loyalitas. Mereka tidak akan melimpahkan kewenangan tersebut kepada orang-orang yang jauh dari mereka dan jauh dari *'ashabiyah*-nya.

Ketika sistem kekhalifahan mengalami kemunduran dan semua pemerintahan bersifat kerajaan dan kekuasaan duniawi semata, maka lembaga-lembaga keagamaan ini semakin jauh dari mereka, sebab lembaga-lembaga tersebut tidak termasuk bagian dari gelar dan simbol-simbol penguasa, lalu kekuasaan bangsa Arab dalam pemerintahan itu hilang sama sekali dan kekuasaan pun berpindah kepada bangsa lain seperti: bangsa Turki dan Barbar. Lembaga-lembaga keagamaan yang ada dalam sistem kekhalifahan ini pun semakin jauh dari mereka, dengan *'ashabiyah* dan lain-lainnya. Hal ini disebabkan, bangsa Arab berkeyakinan bahwa syariat atau Islam adalah agama mereka dan bahwa Nabi Muhammad SAW itu berasal dari mereka, hukum-hukum dan aturannya menjadi pandangan hidup mereka, yang membuat mereka berbeda dari bangsa-bangsa lain. Adapun bangsa-bangsa non-Arab tidak memiliki pandangan demikian, karena mereka memberikan perhatian pada lembaga-lembaga tersebut dan mengangkat pejabat yang berwenang hanya karena melihat sisi keagungan agama saja.

Dengan pandangan ini, mereka dapat mengangkat pejabat berwenang yang berasal dari luar *'ashabiyah* mereka, yang memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas tersebut selama masa kekhalifahan. Orang-orang yang

berkompeten ini seringkali melupakan masa-masa primitive dan dinamika kehidupan yang keras setelah menikmati kemewahan hidup dan kemegahannya selama ratusan tahun dalam pemerintahan tersebut. Mereka mulai mengenakan baju-baju peradaban dengan berbagai kemewahan hidup dan kemegahannya, sehingga menyebabkan mereka tidak memiliki kontrol diri. Akibatnya lembaga-lembaga keagamaan dalam sistem kekuasaan duniawi ini setelah melewati sistem kekhalifahan ini banyak dijabat oleh masyarakat kota yang memiliki kualitas hidup dan keimanan yang rendah. Masyarakatnya kehilangan kemuliaan karena garis keturunan mereka telah kehilangan kompetensi akibat hidup menetap yang mereka jalani. Mereka pun menjadi hina layaknya penduduk menetap lainnya dan tenggelam dalam kemewahan dan kemegahan dunia, serta jauh dari *'ashabiyah* kekuasaan yang melindungi mereka.

Kedudukan mereka dalam pemerintahan tersebut hanya karena bertugas untuk menegakkan agama dan menerapkan hukum-hukum syariat, sebab mereka mendapat tugas untuk itu dan menjadi panutan masyarakat. Penghormatan mereka dalam pemerintahan tersebut bukan lagi karena kemuliaan diri, tapi sebatas penghormatan atas kedudukan mereka yang menjadi bagian dari lembaga-lembaga pemerintahan karena keagungan jabatan keagamaan. Mereka juga tidak memiliki peran signifikan dalam parlemen, meskipun mereka mengahdirinya. Kehadiran mereka dalam parlemen tersebut hanyalah formalitas semata dan tidak memiliki kontribusi apapun, sebab keberadaan seseorang dalam parlemen itu hanyalah bagi orang-orang yang memiliki kompetensi.¹³⁹ Adapun orang yang

¹³⁹ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*,... hlm. 398-399.

tidak berkompetensi didalamnya, maka ia tidak mempunyai kontribusi apapun dalam menyelesaikan persoalan yang dibicarakan, kecuali hanya dimintai pandangannya tentang hukum-hukum syariat dan memberikan fatwa. Sebagian masyarakat mungkin berasumsi bahwa pendapat tersebut tidak benar dan bahwa tindakan para penguasa yang mengeluarkan pakar fikih dan hakim dari musyawarah itu tidak dibenarkan, sebab Rasulullah SAW bersabda: *Ulama adalah pewaris para Nabi*. Ketahuilah bahwa asumsi tersebut tidak tepat, karena kekuasaan kerajaan dan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum alam dan peradaban. Jika tidak demikian, maka ia akan jauh dari politik kekuasaan. Karakter peradaban menyebabkan mereka tidak memberikan kontribusi apapun pada kekuasaan, sebab lembaga legislatif dan eksekutif hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki *'ashabiyah*, yang mampu memberikan solusi atau mengikat, melakukan atau meninggalkan sesuatu. Adapun orang yang tidak memiliki *'ashabiyah* dan tidak mampu menguasai diri sendiri dan tidak pula melindunginya, maka ia hanya akan menjadi beban bagi yang lain.

Kontribusi dan pengertian apapun yang diberikan dalam lembaga tersebut tidaklah memberikan pengaruh sama sekali, kecuali dalam hukum-hukum syariat yang diketahuinya, yang sifatnya terkait dengan bidang fatwa. Adapun dalam bidang kebijakan politik secara umum, maka ia tidak berkompeten untuk itu. Sebab, ia tidak memiliki *'ashabiyah* dan tidak memiliki pengetahuan tentang sosiokultural masyarakat dan aturan-aturannya. Kehormatan dan kemuliaan yang mereka sandang hanyalah bentuk kedermawanan para penguasa dan pemimpin kerajaan, yang mengakui keberadaan agama sebagai sesuatu yang baik dan

menghormati orang-orang yang berkecimpung di dalamnya darimanapun mereka berasal.

Kesaksian dalam pengadilan, merupakan bagian dari tugas keagamaan yang berhubungan dengan praktik pengadilan. Tugas ini pada hakikatnya tergantung pada izin hakim yang menangani sebagai saksi atas warga masyarakat yang berperkara, baik penggugat maupun terdakwa, seraya memiliki tanggung jawab ketika bersaksi, memiliki komitmen untuk menyelesaikan konflik, tercatat dalam dokumen pengadilan, yang dapat menjaga hak-hak masyarakat, harta benda, pinjam-meminjam, dan berbagai muamalah yang terjadi di antara mereka.

Orang yang dapat dijadikan saksi dalam proses pengadilan ini harus adil [berintegritas] sesuai dengan kriteria syariat dan terhindar dari cacat hukum kemudian ia harus mencatatkan semua pernyataannya secara sistematis. Dari segi keharusannya itu memenuhi kriteria-kriteria syariat dan akad-akadnya, maka orang tersebut harus sedikit banyak memahami hukum fikih. Untuk memenuhi syarat-syarat inilah, maka seseorang harus berlatih dan terbiasa melakukannya, sehingga ia menjadi bagian dari orang yang bertugas memberikan kesaksian. Kondisi ini menimbulkan asumsi bahwa kesaksian tersebut seolah-olah menjadi tugas khusus bagi mereka, padahal hakikatnya tidaklah demikian. Keadilan bagi orang yang memberikan kesaksian hanyalah syarat khusus mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai saksi.

Seorang hakim berkewajiban untuk menyeleksi sikap dan perilaku saksi serta mengoreksi jati dirinya sebagai upaya menjaga atau memastikan adanya

sifat keadilan dalam diri mereka yang bersaksi, serta tidak mengabaikannya. Sebab, keberadaannya berhubungan dengan hak-hak masyarakat secara umum, maka tanggung jawab dan akibatnya itu diamanatkan padanya. Jika mereka yang memiliki sifat keadilan telah resmi ditunjuk sebagai saksi, maka ia mempunyai peran vital. Ia dapat memberikan kesaksian kepada hakim tentang siapa yang tidak memiliki keadilan karena semakin luasnya kekuasaan dan kemajemukan masyarakat. Para hakim dituntut untuk dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi di tengah masyarakat berdasarkan bukti-bukti valid. Untuk itu, mereka biasanya membutuhkan para saksi professional ini. Di setiap daerah, mereka memiliki agen-agen sendiri sebagai pusat pertemuan, sehingga orang yang bermuamalah itu mengkontrak mereka untuk dijadikan saksi dan membatasinya dengan aturan-aturan tertulis.¹⁴⁰

F. Negara

Ibnu Khaldun memiliki sebuah konsep tentang negara, yaitu *daulah*, yang diidentifikasi sebagai klan dinasti. Ibnu Khaldun memang menekankan adanya kekuatan yang memaksa dalam suatu kelompok yang memiliki sentimen untuk menjadi *daulah* [satu kekuatan politik yang mendominasi pihak lain]. Sebaliknya, karena keberadaan '*ashabiyah*'-lah sebuah *daulah* dapat diterima: kelompok, dan terutama klan yang terkemuka, tergantung sepenuhnya pada '*ashabiyah*' demi mewujudkan cita-cita mereka untuk mencapai kekuasaan politik. Begitu '*ashabiyah*' mulai memudar, karena sikap hidup mewah dan fenomena-fenomena lain yang berhubungan dengan kehidupan kota maka para pemimpin mulai

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 401-402.

kehilangan kendali politik mereka, dan pada akhirnya menyerah pada kelompok lain yang *'ashabiyah*-nya lebih kuat, seperti: bangsa Arab yang kehilangan kekuasaan atas bangsa Turki. Oleh karena itu, *daulah* dan *'ashabiyah* tampaknya saling bergantung satu sama lain. Laksana sebuah hubungan kausalitas, *'ashabiyah* mungkin lebih kuat, sementara itu *dawlah* tidak bisa dijelaskan sebagai sebuah variabel yang independen.

Ibnu Khaldun tidak menganggap negara sebagai sebuah pranata yang terpisah dari masyarakat yang memunculkannya. Negara tidak mempunyai kekuasaan yang terlepas dari *'ashabiyah*-nya. Namun, apakah ia menganggap ada otoritas politik lain [selain jabatan khalifah] yang mungkin dilegitimasi, sebagai sesuatu yang lebih daripada semata-mata kekuatan yang kasatmata? Memang ia menganggap pranata politik sebagai hasil yang niscaya dari gerak kekuatan alamiah eksistensi manusia, dan sebagai prasyarat bagi peradaban manusia. Akan tetapi, Ibnu Khaldun tampaknya tidak menganggap hal ini sebagai legitimasi rasional atas otoritas negara, seperti yang dikemukakan oleh para pemikir politik Eropa. Ia tidak merekomendasikan hal ini sebagai sebuah alasan mengapa orang harus menyatakan kesetiaan mereka kepada *daulah*. Dia mengatakan bahwa para filosof menilai bahwa negara didasarkan atas rasio, tetapi ia menganggap negara semacam itu sebagai negara yang cacat dari sisi otoritas moral. Rakyat hanya berkewajiban memberikan kesetiaan mereka kepada negara yang menjalankan syariat agama, dan dalam hal ini tampaknya Ibnu Khaldun beranggapan bahwa suatu negara dianggap sah kendati pemimpinnya memegang kekuasaan dengan

kekuatan kecil plus *'ashabiyah* atau hanya memiliki kekuatan. Dengan kata lain, ia mengadopsi arus utama pemikiran para fukaha' Sunni seperti: Ibnu Jam'ah.¹⁴¹

G. Asal Mula Munculnya Negara

Menurut Ibnu Khaldun, adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Dia tidak dapat hidup tanpa organisasi kemasyarakatan yang disebut “ negara kota” atau “polis”. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam bentuk atau keadaan yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan makanan, sementara itu kemampuan seorang manusia tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan. Untuk mencukupi kebutuhan makanan itu paling sedikit untuk satu hari saja diperlukan banyak pekerjaan, misalnya dari butir-butir gandum supaya menjadi potongan-potongan roti yang siap dimakan, memerlukan proses yang cukup panjang. Butir-butir gandum itu harus ditumbuk dahulu, kemudian dijadikan adonan dan akhirnya dibakar sebelum siap dimakan, dan untuk semuanya itu diperlukan alat-alat yang untuk mengadakannya itu membutuhkan bantuan atau kerjasama dari pandai besi, tukang kayu dan sebagainya. Bahkan kalau misalnya ada manusia yang dapat memakan butir-butir gandum yang masih mentah, untuk pengadaan butir-butir gandum mentah itupun juga memerlukan banyak pekerjaan, yakni mempersiapkan tanah, penaburan bibit, pengetaman dan pemisahan butir-butir itu dari kulitnya, dan untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut dibutuhkan sejumlah alat yang tidak

¹⁴¹ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, ter. Abdullah Ali & Mariana Ariestyawati (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 334-336.

mungkin dikerjakan hanya oleh satu orang saja, melainkan memerlukan bantuan dari banyak orang.

Demikian pula halnya mengenai keamanan jiwa, tiap orang memerlukan bantuan dari sesamanya dalam pembelaan diri terhadap ancaman bahaya. Menurut Ibnu Khaldun, ketika Allah menciptakan alam semesta dan membagi-bagi kekuatan antara makhluk-makhluk hidup, banyak binatang yang mendapatkan kekuatan lebih sempurna daripada yang diberikan kepada manusia. Watak agresif adalah sesuatu yang alami, yang terjadi pada tiap makhluk hidup. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan kepada masing-masing makhluk hidup suatu anggota badan yang khusus untuk membela diri terhadap serangan agresi. Bagi manusia, untuk pembelaan itu, Allah SWT memberikan kemampuan berpikir dan dua buah tangan. Dengan bantuan kemampuan berpikir, tangan manusia dapat mempersiapkan ladang bagi pertumbuhan dan berbagai kepandaian serta pertukangan, yang menghasilkan berbagai alat dan senjata untuk membela diri, seperti: tombak yang menggantikan peranan tanduk binatang, dan pedang sebagai pengganti cakar.¹⁴²

Manusia pada umumnya tidak mampu membela diri terhadap binatang-binatang buas juga tidak mampu membuat dan mempergunakan alat atau senjata-senjata yang diperlukan untuk pembelaan diri, bukan saja oleh karena banyaknya macam alat atau senjata itu, juga untuk membuatnya diperlukan berbagai kemahiran. Manusia untuk hidup perlu makan dan untuk aman harus dapat

¹⁴² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 99-100.

membela diri terhadap serangan dari makhluk-makhluk hidup yang lain. Dua hal tersebut tidak dapat dilakukan seorang diri, maka diperlukan adanya kerjasama antar sesama manusia, dan itulah sebabnya mengapa organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Tanpa organisasi itu eksistensi manusia tidak akan lengkap, dan kehendak Allah untuk mengisi dunia ini dengan umat manusia dan membiarkannya berkembang biak sebagai khalifah-khalifah Allah di muka bumi ini tidak akan terlaksana. Inilah yang dinamakan peradaban.

Setelah organisasi kemasyarakatan terbentuk dan peradaban merupakan suatu kenyataan di dunia ini, maka masyarakat membutuhkan seseorang yang dengan pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah antara para anggota masyarakat. Watak agresif dan tidak adil itu terdapat juga dalam diri manusia. Senjata-senjata yang dipergunakan untuk melindungi manusia terhadap watak agresif dari binatang-binatang, tidaklah mampu menghadapi watak agresif manusia seorang manusia terhadap yang lain, karena semua orang memiliki senjata-senjata tersebut. Itulah sebabnya diperlukan sesuatu yang lain untuk menangkal watak agresif manusia terhadap sesamanya. Penangkal tersebut tidak dapat datang dari luar, karena semua binatang yang lain tidak setinggi manusia baik dalam persepsi maupun inspirasinya. Adapun yang dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah itu haruslah seorang dari masyarakat itu sendiri. Dia harus mempunyai pengaruh kuat atas anggota-anggota masyarakat juga mempunyai kekuasaan dan otoritas atas mereka, dan dengan demikian tidak ada seorangpun di antara anggota masyarakat dapat mengganggu atau menyerang sesama anggota masyarakat yang lain. Tokoh yang mempunyai kekuasaan dan wibawa yang

memungkinkannya bertindak sebagai penengah, pemisah dan sekaligus hakim itu adalah Raja atau Kepala Negara.¹⁴³

H. Negara dan Perkembangannya Sepanjang Sejarah

Menurut Ibnu Khaldun, negara seperti makhluk hidup yang lahir, mekar menjadi tua, dan akhirnya hancur. Negara mempunyai umur seperti makhluk hidup lainnya. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa umur suatu negara adalah tiga generasi, yakni sekitar 120 tahun. Satu generasi dihitung umur yang biasa bagi seseorang, yaitu 40 tahun. Ketiga generasi tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Generasi pertama, hidup dalam keadaan primitif yang keras dan jauh dari kemewahan juga kehidupan kota, masih tinggal di pedesaan dan padang pasir.
- b. Generasi kedua, berhasil meraih kekuasaan dan mendirikan negara sehingga generasi ini beralih dari kehidupan primitif yang keras ke kehidupan kota yang penuh dengan kemewahan.
- c. Generasi ketiga, dalam tahap ini negara mengalami kehancuran sebab generasi ini tenggelam dalam kemewahan, ketakutan, dan kehilangan makna kehormatan, keperwiraan, serta keberanian.

Perkembangan negara melalui lima tahap, yaitu:

1. Tahap pendirian negara

Tahap ini merupakan saatnya untuk mencapai tujuan, menaklukkan segala rintangan dan menguasai kekuasaan. Negara tidak akan tegak, kecuali

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 100-101.

dengan *'ashabiyah*. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa *'ashabiyah* membuat orang menyatukan upaya menyamakan tujuan, mempertahankan diri, dan menolak atau mengalahkan musuh.

2. Tahap pemusatan kekuasaan.

Pemusatan kekuasaan adalah kecenderungan alamiah yang ada dalam diri manusia. Pada waktu itu, pemegang kekuasaan melihat bahwa kekuasaannya telah mapan maka ia akan berupaya menghancurkan *'ashabiyah*, memonopoli kekuasaan, dan menjatuhkan anggota-anggota *'ashabiyah* dari roda pemerintahan.

3. Tahap kekosongan dan kesantiaian

Tahap untuk menikmati buah kekuasaan seiring dengan watak manusia, seperti mengumpulkan kekayaan, mengabadikan peninggalan dan meraih kemegahan. Negara pada tahap ini sedang berada pada puncak perkembangannya.

4. Tahap ketundukan dan kemalasan

Pada tahap ini, negara dalam keadaan statis, tidak ada perubahan yang terjadi. Negara seakan-akan sedang menantikan permulaan akhir kisahnya.

5. Tahap foya-foya dan penghamburan kekayaan

Negara telah memasuki masa tua dan diliputi penyakit kronis yang hampir tidak dapat dihindari serta menuju keruntuhan. Perlu dicatat bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang politisi yang sangat memahami dunia politik Islam pada abad ke-14. Dengan melihat keruntuhan dan kelemahan yang menimpa dunia Islam pada umumnya ketika itu, serta mengamati sendiri kemunduran

kebudayaan Arab-Islam di Andalusia, dibawah tekanan pasukan spanyol, tidak mengherankan jika ia berpendapat bahwa segala sesuatu akan hancur.¹⁴⁴

Dari serangkaian pemikiran tentang tahap perkembangan negara , Ibnu Khaldun mengungkap sejumlah persoalan yang menjadi faktor perubahan sosial. Teori perubahan Ibnu Khaldun sangat tajam dan mendalam, di antara pemikirannya yang mendalam:

- a. Metode historis menawarkan pendekatan terbaik untuk memahami perubahan sosial.
- b. Faktor yang menyebabkan perubahan sosial itu banyak dan beragam.
- c. Bentuk-bentuk organisasi sosial yang berbeda itu menciptakan tipe kepribadian yang berbeda pula.
- d. Konflik adalah mekanisme mendasar dari perubahan.
- e. Berbagai faktor psikologi sosial, seperti: kepemimpinan, kepribadian, *'ashabiyah* itu bisa membantu menjelaskan untuk memahami penyebab dan akibat konflik antar kelompok.
- f. Perubahan cenderung menjalar, ini terjadi di semua institusi sosial, agama, keluarga, pemerintahan, dan ekonomi. Semuanya terlibat dalam proses perubahan ini.¹⁴⁵

I. Bentuk-bentuk Pemerintahan

Menurut Ibnu Khaldun, sistem pemerintahan itu ada tiga macam:

¹⁴⁴ Jubair Situmorang, *Model Pemikiran & Penelitian Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 185-187.

¹⁴⁵ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, [Bandung: Pustaka Setia, 2010], hlm. 145-146.

1. *Al-Mulk* (Kerajaan yang natural): Sistem pemerintahan yang membawa sekalian umat sesuai dengan tujuan dan keinginan hawa nafsu. Yang dia maksud dengan tabiat natural adalah insting, atau kecenderungan dan keinginan insting yang tersusun dalam satu individu, seperti: egoisme, keinginan untuk menjadi arogan atau despotis, dan berusaha mewujudkan keserakahan individu berdasarkan egoisme.
2. *Al-Mulk* politik: Sistem pemerintahan yang membawa masyarakat sesuai dengan pandangan rasio dalam mencapai kemaslahatan duniawi dan mencegah mudharat, jenis pemerintahan ini dipuji dari satu sisi, dan dicela pada sisi lain. Di sela-sela penjelasannya tentang kedua jenis pemerintahan ini, dia mengatakan “Ketika hakikat sebuah pemerintahan merupakan tuntutan dari perkumpulan anak manusia yang bersifat aksiomatis, dan puncak personifikasinya adalah penindasan dan penundukan, yang keduanya merupakan akibat dari naluri kemarahan dan kehewanan, tidaklah mengherankan jika kebijakan-kebijakan penguasanya telah melenceng dari kebenaran dan menindas orang-orang yang berada dibawah kekuasaannya.

Pemerintahan jenis pertama itu menyerupai apa yang kita namakan sekarang dengan pemerintahan otoriter, individualis, otokrasi, atau inkonstitusional.¹⁴⁶ Bisa jadi, termasuk di dalamnya kasus-kasus ketika orang-orang yang berkuasa berdasarkan hawa nafsu dan instingnya tergabung dalam kelompok tertentu atau kelas masyarakat tertentu. Yang dihasilkan oleh sistem

¹⁴⁶ Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, ter. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 87.

pemerintahan seperti ini adalah *chaos*, perpecahan, instabilitas dan kehancuran negara.

Adapun tentang pemerintahan jenis kedua adalah apa yang sekarang kita sebut sebagai pemerintahan republik ataupun juga kerajaan konstitusional yang dapat mewujudkan keadilan sampai batasan tertentu dan membawa berbagai manfaat bagi rakyat dalam kehidupan dunia karena menjalankan kebijakannya berdasarkan rasio yang telah digariskan oleh para pemikir dan intelektual umat serta dapat membawa stabilitas dan keteraturan kehidupan juga membawa kemajuan dan kejayaan negara. Akan tetapi, harus juga dikatakan bahwa sistem ini adalah sebuah orde materialis, yang hanya membatasi diri dalam urusan keduniaan dan mengesampingkan kehidupan spiritual dan aspek-aspek keagamaan, hingga tidak mampu mewujudkan kepentingan rakyatnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat.

3. Dengan demikian, perlu adanya sebuah sistem ketiga, yang oleh Ibnu Khaldun didefinisikan sebagai, identik dengan membawa semua orang untuk berpikir sesuai dengan jalan agama, dalam memenuhi semua kepentingan mereka, baik yang bersifat keukhrawian maupun keduniawian yang juga harus dirujuk kepada yang disebut pertama (keukhrawian) karena dalam pandangan syara', semua situasi dan kondisi keduniaan harus selalu memperhatikan pula kemaslahatan ukhrawi. Dengan demikian, pemerintahan model ketiga ini adalah perwakilan dari Allah sebagai pemilik syariat dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengan ajaran-ajarannya. Inilah yang disebut sebagai kekhalfahan atau keimamahan, ataupun seperti yang jelas

dipahami dari definisinya yang disebut sebagai, pemerintahan yang islami. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun juga mengadakan studi komparasi dengan dua bentuk pemerintahan sebelumnya: “ Jika aturan perundang-undangan diputuskan oleh para intelektual dan pembesar negara, kebijakan politiknya disebut rasional, dan jika aturan-aturan itu berasal dari Allah yang memutuskan dan mensyariatkannya, maka orientasi politiknya adalah religius, bermanfaat dalam kehidupan keduniaan dan keakhiratan. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa bentuk pemerintahan yang berorientasikan kepada kekerasan, penindasan, dan mengesampingkan potensi kemarahan rakyatnya pasti akan menimbulkan kerusakan dan permusuhan. Bentuk seperti ini tidaklah terpuji dan tidak sesuai dengan tuntunan kebijaksanaan politik. Adapun bentuk pemerintahan yang berorientasikan politik murni dan menerapkan undang-undangnya juga tidak terpuji mengingat bentuk ini tidak menggunakan cahaya Allah; dan dalam Al-Qur’an Allah berfirman: barangsiapa yang tidak menjadikan Allah sebagai cahaya-Nya pastilah tidak akan mendapatkan cahaya (atau hidup dalam kegelapan), karena Allah dalam kapasitas-Nya sebagai pembuat syariat itu lebih mengetahui kepentingan rakyat banyak yang tidak disadari oleh diri mereka sendiri, dalam hal-hal yang berakibat di hari akhirat.¹⁴⁷

J. Kerajaan

Raja merupakan jabatan terhormat dan menyenangkan, yang mencakup seluruh kenikmatan dunia, nafsu seksual, dan kebanggaan, sehingga seringkali

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 88-89.

mendorong setiap individu untuk memperebutkannya. Hanya sedikit individu yang rela menyerahkan kepemimpinan tersebut kepada kerabat ataupun temannya kecuali orang tersebut dapat mengalahkannya, sehingga akan terjadi konflik yang menimbulkan peperangan, saling membunuh, dan saling mengalahkan. Tidak satupun dari jabatan dan kepemimpinan tersebut dapat diperoleh kecuali dengan *'ashabiyah*, lika-liku semacam ini tidak dipahami masyarakat secara umum dan mereka melupakannya. Mereka lupa dengan perjanjian dasar terbentuknya kerajaan sejak awal. Mereka dibesarkan dalam peradaban tersebut di dalam waktu yang lama dan telah berganti dari generasi ke generasi, sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi pada kerajaan tersebut pada awal berdirinya.

Mereka hanya mengetahui orang-orang yang menjalankan pemerintahan kerajaan tersebut, memantapkan kepemimpinan mereka, menyerahkan kekuasaan kepada mereka, dan tidak membutuhkan *'ashabiyah* pada awal mereka menerima tanggung jawab untuk melanjutkan estafet kekuasaan. Mereka tidak pernah mau tahu bagaimana situasi yang melatarbelakangi berdirinya kerajaan tersebut dengan berbagai perjuangan, penderitaan, dan pengorbanan para pendirinya.¹⁴⁸ Pada umumnya, di masa awal kerajaan-kerajaan berdiri itu sulit bagi jiwa untuk tunduk dan patuh kepadanya kecuali kekuatan yang kuat, yang dapat menguasai. Orang-orang merasa canggung dengan rajanya dan tidak terbiasa. Apabila kepemimpinan telah stabil dan dilimpahkan kepada putra mahkota yang telah dipersiapkan secara istimewa untuk menduduki kekuasaan kerajaan dan mewariskannya dari generasi ke generasi selama beberapa periode, maka jiwa-jiwa mereka akan

¹⁴⁸ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*, ter. Masturi Ilham (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 254.

terlupa dengan jerih payah, perjuangan, dan pengorbanan pada awal kerajaan tersebut berdiri. Mereka hanya mengetahui bahwa jabatan kepemimpinan tersebut telah mengakar dan memang dipersiapkan untuk generasi tersebut. Keyakinan agama telah menancap kuat dalam diri mereka, tunduk dan patuh kepada mereka, sehingga rakyat bersedia berjuang bersama para raja sebagaimana mereka memperjuangkan dasar-dasar keyakinan mereka. Ketika semua ini telah terjadi, mereka tidak lagi membutuhkan *'ashabiyah*. Bahkan ketaatan kepada pemimpin telah menjadi kewajiban yang ditentukan Allah SWT, yang tidak bisa diganti dan ditentang. Pada saat itulah, dukungan mereka kepada penguasa dan kerajaan bisa berdasarkan loyalitas. Orang-orang yang menggabungkan diri dengan garis keturunan, yang hidup dibawah naungan *'ashabiyah* mereka, dan bisa berdasarkan *'ashabiyah-ashabiyah* yang berada di luar garis keturunannya, yang memasuki wilayahnya.

Kondisi semacam ini terjadi pada Bani Abbasiyah. *'Ashabiyah* Arab hancur pada masa pemerintahan Al-Mu'thasim dan putranya Al-Watsiq. Dukungan kepada mereka hanya diberikan berdasarkan loyalitas dari bangsa non-Arab, Turki, Dailam, Bani Saljuk, dan lainnya kemudian bangsa non-Arab ini berhasil menguasai beberapa wilayah. Pada saat yang sama, kekuasaan kerajaan Abbasiyah makin berkurang dan terbatas. Kerajaan sudah tidak mampu mempertahankan wilayah Baghdad hingga Dailam berhasil menduduki dan menguasainya, sehingga seluruh negeri berada dibawah pemerintahan mereka. Setelah pemerintahan mereka mengalami kemunduran dan Bani Saljuk yang datang sesudahnya semakin kuat, maka pemerintahan pun berada dibawah

kekuasaan mereka. Lalu pemerintahan Bani Saljuk ini juga mengalami kemunduran hingga dibumihanguskan oleh bangsa Tatar. Mereka berhasil membunuh khalifah dan menghapuskan jejak pemerintahannya.¹⁴⁹

Salah satu karakter dasar kerajaan adalah ketenangan dan ketentraman, hal ini disebabkan karena suatu bangsa tidak akan memperoleh kekuasaan kecuali dengan perjuangan. Tujuan akhir dari perjuangan ini adalah kemenangan dan kekuasaan. Apabila tujuan telah dicapai, maka upaya untuk mendapatkannya telah berakhir dengan sendirinya. Jika kekuasaan telah diperoleh, maka mereka enggan melibatkan diri dalam penderitaan yang mereka tempuh ketika hendak menggapai kekuasaan. Mereka memilih istirahat, menenangkan diri, dan bersantai. Mereka juga berupaya mendapatkan fasilitas-fasilitas kemewahan sebagai penguasa seperti rumah yang megah, dan pakaian-pakaian mewah. Untuk itu, mereka lantas membangun istana-istana megah, membuat air mancur, mendirikan taman-taman indah, dan berupaya menikmati kenikmatan dunia. Mereka lebih memilih bersantai daripada harus hidup bersusah payah, seperti: memilih pakaian-pakaian yang indah, tempat-tempat makan yang mewah, bejana, dan berbagai simbol kemewahan lainnya selama mereka mampu memenuhinya. Mereka menjadikan dinamika hidup bermewah-mewah semacam ini dan mewariskannya kepada generasi-generasi mereka.¹⁵⁰

1. Usia Kerajaan

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 256-257.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 284.

Usia alami manusia berdasarkan keterangan para dokter dan para pakar astrologi itu mencapai 120 tahun. Ini adalah perhitungan waktu berdasarkan peredaran bulan menurut para astrolog. Usia setiap generasi tidaklah sama, tergantung situasi dan kondisi yang menyertainya, sehingga dapat bertambah atau berkurang. Bisa saja umur sebagian orang mencapai 120 tahun, dan sebagian lagi 50 tahun, 80 tahun, atau 70 tahun, tergantung kondisi-kondisi yang melingkupinya dan perhitungan ahlinya. Usia kita berkisar antara 60 hingga 70 tahun, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits¹⁵¹, dan tidak melebihi usia alami, yang mencapai 120 tahun kecuali jarang dan karena kondisi perbintangan yang langka. Hal ini sebagaimana yang dialami Nabi Nuh dan beberapa orang dari kaum Ad dan Tsamud.

Adapun usia pemerintahan suatu kerajaan, meskipun berbeda-beda berdasarkan situasi dan kondisi yang melingkupinya, namun biasanya pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut tidak lebih dari usia tiga generasi, yang merupakan usia satu orang dengan ukuran normal. Dengan demikian, maka usia 40 tahun, yang merupakan akhir pertumbuhan dan perkembangan manusia telah sampai pada batasnya. Oleh karena itulah, kami mengatakan bahwa usia seseorang adalah usia satu generasi. Pernyataan kami ini didukung oleh hikmah dari peristiwa paceklik yang dialami Bani Israel, yang dimaksud dengan 40 tahun dalam ayat tersebut adalah punahnya empat generasi yang hidup, dan lahirnya generasi baru, yang tidak merasakan dan mengenal penghinaan bangsa lain. Hal

¹⁵¹ Hadits ini diriwayatkan Ibnu Majah, dalam kitab *Az-Zuhd*, no. 67; At-Tirmidzi, dalam kitab *Az-Zuhd*, no. 23, dan *Ad-Da'awat*, no. 101.

ini menunjukkan bahwa 40 tahun merupakan usia suatu generasi, dan sama dengan usia satu orang.

Kami mengatakan, usia pemerintahan suatu kerajaan biasanya tidak melebihi tiga generasi, sebab generasi pertama tetap dalam gaya hidup yang primitif dan liar, dengan kebiasaan yang keras dan pemberani, merampok, dan menikmati kebesaran dalam kebersamaan (dalam satu *'ashabiyah* atau suku). Dengan dinamika hidup semacam ini, maka kekuatan *'ashabiyah* yang dimilikinya masih terjaga dengan baik. Kekuatan *'ashabiyah* dan perilaku mereka masih disegani dan rakyat pun tunduk kepada mereka kemudian datanglah generasi kedua yang telah mengalami perubahan kondisi dalam mengelola kekuasaan dan kekayaan; dari kehidupan primitif menjadi ber peradaban, dari kehidupan yang keras menjadi makmur dan dalam kemewahan, dari kebersamaan dalam menikmati kebesaran menjadi individual dan menyebabkan yang lain bermalasan untuk menggapainya, dari kehormatan memperluas kekuasaan menjadi sikap berdiam diri dan bermalasan. Hal ini tentu akan memperlemah kekuatan *'ashabiyah* yang dimiliki. Mereka pun menjadi lemah dan mudah ditundukkan.¹⁵² Mereka memang masih mempunyai beberapa karakter yang dibutuhkan karena ikut melihat dan menyaksikan kondisi generasi pertama, yaitu: berupa kehormatan dan perjuangan mereka dalam meraih kebesaran dan mencapai tujuan, juga dalam upaya membela dan mempertahankan diri. Mereka tidak dapat melepaskan semua itu secara total, meski sebagian dari pendorong kebesaran mereka telah hilang. Mereka hanya bisa berharap dapat menikmati

¹⁵² Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*, ter. Masturi Ilham dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 290-291.

kembali kejayaan yang pernah diraih generasi pertama, atau hanya sekedar anggapan tentang adanya kebesaran dalam diri mereka.

Adapun generasi ketiga itu mereka melupakan masa-masa primitif dan hidup liar yang terjadi pada generasi pertama mereka. Seolah-olah hal itu tidak pernah ada. Mereka kehilangan kebanggaan pada kehormatan dan *'ashabiyah* yang mereka miliki, misalnya naluri untuk menguasai. Mereka berada di ambang batas gaya hidup mewah yang mereka nikmati dengan berbagai kesenangan dan kenikmatan hidup. Gaya hidup semacam ini menyebabkan mereka menjadi beban pemerintah, sehingga termasuk dalam golongan kaum perempuan dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan. *'Ashabiyah* yang mereka miliki pun hilang secara keseluruhan. Mereka juga melupakan perlindungan, pertahanan, pembelaan diri, dan ekspresi kekuasaan.

Generasi semacam ini lebih senang mengelabui masyarakat dengan pakaian berpangkat dan seragam yang mereka kenakan, menunggang kuda, dan wawasan yang luas. Mayoritas dari generasi semacam ini lebih penakut dibandingkan kaum perempuan yang mandiri. Ketika kerajaan membutuhkan kekuatan mereka, maka mereka tidak mampu memenuhinya dan tidak pula sanggup mempertahankan diri dari suatu serangan. Hal ini mengharuskan pemerintah kerajaan membutuhkan bantuan kekuatan bangsa lain sebagai pendukung, sehingga banyak mengambil tenaga koalisi dan sekutu hingga Allah berkehendak untuk meruntuhkannya kemudian kerajaan akan hancur dengan segala yang dimilikinya. Tiga generasi ini berumur 120 tahun. Biasanya suatu kerajaan tidak dapat melampaui umur tersebut. Hanya saja memang terkadang ada

kurang lebihnya, jika tidak ada gangguan-gangguan lain, seperti serangan dari bangsa lain. Dengan demikian, maka kehancuran akan terhambat dan biasanya serangan tidak terjadi. Apabila terjadi serangan, maka mereka tidak dapat mempertahankan diri.¹⁵³

2. Kondisi Kerajaan

Pemerintahan mengalami transisi dalam berbagai fase dan keadaan yang berbeda. Para penyelenggara kerajaan memiliki gaya hidup tertentu dalam setiap fase yang berbeda dengan fase yang lain, sebab gaya hidup mengikuti kondisi yang mempengaruhinya secara naluriah. Kondisi kerajaan dan fase-fase yang harus dilaluinya biasanya tidak lebih dari lima fase:

- a. Fase pemantapan kekuasaan dengan cara penggulingan dan penguasaan terhadap para pembela dan pendukungnya, serta merebut kekuasaan dari tangan penguasa sebelumnya. Dalam fase ini terdapat sisi keteladanan bagi kaumnya, baik dalam mencapai kejayaan, pungutan pajak, mempertahankan hak dan menggalang kekuatan militer, dimana tanpa keterlibatan seluruh komponen bangsa, maka ia tidak dapat berbuat sama sekali. Inilah konsekuensi dari *'ashabiyah* yang mampu meraih kekuasaan. *'Ashabiyah* ini harus tetap berada dalam diri masing-masing.
- b. Fase otoriter dan kesewenang-wenangan terhadap kaumnya dan bersikap individual dalam menjalankan pemerintahan dengan cara mengekang, mengebiri, membungkam, dan membatasi peran mereka dalam urusan pemerintahan. Dalam fase ini, rezim yang berkuasa lebih mempercayai orang-

¹⁵³ *Ibid*, hlm. 291-292.

orang luar yang loyal, dan mau bergabung dengannya, serta memperbanyak jumlah mereka untuk membungkam anggota *'ashabiyah* dan keluarganya yang menuntut pembagian peran dan tugas dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan jasa dan bagian masing-masing. Rezim yang berkuasa akan menghalangi dan menutup akses jalan menuju tujuan tersebut, dan menjauhkan mereka dari pusat kekuasaan hingga beberapa generasi dan seluruh kekuasaan berada dalam kendalinya.¹⁵⁴ Dengan kebijakan politik semacam ini, maka ia dapat mempersiapkan tempat bagi keturunannya untuk dapat menikmati dan melanjutkan kebesaran yang telah dibangunnya. Untuk itu, seluruh konsentrasinya terfokus pada mempertahankan dan melindungi kekuasaannya, sebagaimana perjuangan para generasi pertama dalam membangun pemerintahan atau bahkan lebih keras dari itu, sebab generasi pertama berjuang menyingkirkan orang-orang yang berada diluar kelompoknya, sehingga dukungannya berasal dari seluruh anggota *'ashabiyah*, sedangkan generasi berikutnya itu menyingkirkan anggota keluarga dan *'ashabiyah*-nya sendiri, sehingga tidak semua anggota *'ashabiyah* dan keluarganya yang mendukungnya kecuali hanya sedikit dan itupun dari keluarga jauh. Dengan kebijakan otoriter ini, maka rezim ini telah menempuh jalan yang sangat sulit.

- c. Fase stabilitas dan ketenangan, karena manfaat dari kekuasaan telah berhasil diperoleh, dimana karakter manusia memang cenderung demikian: mengumpulkan kekayaan, melanggengkan pengaruh, dan melebarkan

¹⁵⁴ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*,... hlm. 301-302.

popularitas. Untuk itu, maka upaya yang ia lakukan juga terfokus pada pengumpulan retribusi, mengatur pendapatan dan pengeluaran, menghitung seluruh pembiayaan yang dikeluarkan, mendirikan berbagai bangunan monumental, pabrik-pabrik yang besar, gedung-gedung pencakar langit, memberikan hadiah kepada para delegasi dan diplomat dari berbagai bangsa dan para pemimpin kabilah, serta memberikan tunjangan kepada warga masyarakatnya. Selain itu, pemerintah juga menaikkan gaji dan memberikan tunjangan kepada orang-orang yang loyal dan rela bergabung dengannya serta para pengawalnya dengan cara memberikan harta, pangkat, memperkuat pasukannya, dan menambah gaji bulanan mereka.¹⁵⁵ Dengan limpahan tunjangan dan gaji semacam itu, maka akan tampak pada diri mereka (tanda-tanda kemakmuran), dari segi pakaian, persenjataan, dan tanda-tanda pangkat yang harus dikenakan pada parade kerajaan. Dengan penampilan mewah dan megah semacam ini, maka kerajaan-kerajaan yang telah tunduk dan berada dibawah kekuasaannya akan kagum dan kerajaan-kerajaan yang menentang akan merasa takut karenanya. Fase ini merupakan tahapan puncak otoriter yang dapat dijalankan oleh rezim yang berkuasa, karena dalam fase-fase ini secara keseluruhan, mereka bebas berpendapat dan menentukan pilihan untuk membangun kejayaan dan kebesaran mereka, seraya menjelaskan program kerja kepada generasi sesudahnya.

- d. Fase kepuasan dan mudah menyerah atau pasrah. Dalam fase ini, rezim yang berkuasa sudah merasa puas dengan pembangunan yang dicapai generasi

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm. 302.

pendahulu mereka dalam kehidupan damai dengan para penguasa yang bersahabat dengannya maupun yang masih bermusuhan. Hal ini dilakukan dengan mencontoh para pendahulunya, sehingga ia mengikuti jejak mereka setapak demi setapak dan penuh perhitungan. Ia berkeyakinan bahwa keluar dari tradisi mereka merupakan kehancuran, karena mereka merasa lebih mengenal kejayaan yang telah mereka bangun.

- e. Fase pemborosan dan hidup berlebih-lebihan. Dalam fase ini, rezim yang berkuasa cenderung menghancurkan kejayaan yang telah dibangun oleh pendahulu mereka, dengan membenamkan diri mereka dalam memuaskan nafsu dan kesenangan dunia, mudah menghambur-hamburkan kekayaan kerajaan untuk memenuhi kebutuhan perutnya dan pesta-pesta yang diselenggarakannya, mengumpulkan para jagoan dan para pelacur untuk menjalankan tugas-tugas penting kerajaan dimana mereka tidak punya kompetensi untuk menjalankannya. Mereka juga tidak mengetahui apa yang harus dan tidak boleh dikerjakan. Rezim ini juga berupaya menyingkirkan para pemimpin dan politisi yang didukung bangsanya dan orang-orang yang menjadi bagian dari pemerintahan masa lalu.

Kebijakan pemerintah semacam ini pada akhirnya akan memicu kemarahan rakyat terhadapnya sehingga mereka memusuhi dan menarik dukungan terhadap rezimnya. Selain memperlemah pasukan militer karena gaji dan tunjangan mereka lebih banyak disalurkan dalam pemenuhan nafsu seraya menghalangi mereka untuk mengontrol dan mengawasinya. Sikap semacam ini tentu menghancurkan bangunan kejayaan dan meruntuhkan kekuatan yang

dibangun oleh para pendahulunya. Dalam fase ini, kerajaan berada di ambang kehancuran sebagai suatu proses yang wajar. Kerajaan dihinggapai penyakit kronis yang hampir tidak ada jalan keluar dan tidak dapat disembuhkan, hingga benar-benar hancur.¹⁵⁶

3. Terbaginya Kerajaan

Yang pertama kali terjadi akibat lemahnya kerajaan adalah terbaginya kerajaan itu. Hal itu terjadi karena kekuasaan ketika telah besar dan mencapai puncak kemewahan dan kenikmatan juga pemimpin kerajaan memegang otoritas kemuliaan dan ingin memonopolinya. Dia tidak suka keterlibatan orang lain dan memutuskan hal-hal yang dapat memberi peluang untuk itu sebisa mungkin dengan cara membinasakan kerabat-kerabat yang dicurigai akan mengancam kedudukannya, maka terkadang orang-orang yang selama ini ikut berperan bersamanya mulai mengkhawatirkan diri mereka sendiri kemudian mereka pergi ke daerah yang jauh. Orang-orang yang merasa dibohongi dan dicurigai dengan hal yang sama pun menyusul mereka disana. Wilayah kerajaan itu mulai menyempit dan berhenti pada tempat jauh tersebut, lalu orang yang melepaskan diri itu memisahkan diri dari kekerabatan disana. Dia pun semakin besar akibat kemunduran wilayah kerajaan sehingga dia berbagi kerajaan atau setidaknya hampir demikian.

Mari kita lihat kenyataan itu pada kekuasaan Bani Umayyah yang telah berpindah kepada Bani Abbasiyah dan kerajaan Arab telah mencapai puncak kemenangan dan kemewahan serta mulai tidak dapat memantau wilayah yang

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm. 303-304.

jauh, maka Abdurrahman Ad-Dakhil melepaskan diri ke Andalusia (wilayah terjauh dari kerajaan Islam). Disana dia mendirikan suatu kekuasaan baru dan mengambil sebagian dari kerajaan mereka.¹⁵⁷ Dia memecah kerajaan itu menjadi dua bagian kerajaan kemudian Idris melepaskan diri ke Maghrib dan membangun kekuasaannya disana. Setelah dia berkuasa, putranya memerintah orang-orang Barbar dari Eropa, Mughilah dan Zanatah. Dia menguasai wilayah kedua Maghrib itu kemudian kerajaan semakin menyusut. Aghalibah menjadi terdesak dalam menolak mereka kemudian muncul Syi'ah yang dipimpin oleh Kutamah dan Shanhajah. Mereka menguasai Afrika, Maghrib, kemudian Mesir, Syam dan Hijaz, dan mengalahkan Bani Idris kemudian membagi kerajaan menjadi dua kerajaan lain. Jadilah kerajaan Arab menjadi tiga: kerajaan Bani Abbasiyah yang merupakan pusat dan asal orang Arab, yang bahan materi mereka adalah Islam, kerajaan Bani Umayyah baru di Andalusia, yang kerajaan dan kekhalifahan lama mereka berada di Masyriq, dan kerajaan Ubaidiyah di Afrika, Mesir, Syam dan Hijaz. Kerajaan ini masih berdiri sampai mendekati kehancurannya secara berdekatan atau bersamaan.

Demikian juga kerajaan Bani Abbasiyah terbagi menjadi kerajaan-kerajaan lain, lalu terdapat Bani Sasan di Wara' An-Nahr dan Khurasan, lalu Alawiyyah di Dailam dan Thabaristan. Kondisi ini berakhir dengan kekuasaan Dailam atas Irak kemudian muncullah dinasti Saljuk yang menguasai semua itu, kemudian mereka juga terbagi setelah mencapai puncaknya. Demikian juga dalam kerajaan Shanhajah di Maghrib dan Afrika ketika sampai pada puncaknya pada masa Badis

¹⁵⁷ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*,... hlm. 518-519.

bin Manshur. Pamannya, yaitu: Hammad, yang memisahkan diri dan mengambil sebagian daerah dari kerajaan-kerajaan Arab yang ada di antara gunung Uras sampai gunung Tilmisan dan Malawiyah. Dia membangun benteng di gunung Kutamah yang dikelilingi parit. Dia tinggal disana dan menguasai markas mereka, yaitu Asyir di gunung Tithara. Dia mendirikan suatu kerajaan lain yang menyaingi kerajaan Bani Badis. Bani Badis sendiri tetap tinggal di Qairuwan dan sekitarnya. Keadaan itu terus berlangsung sampai kekuasaan keduanya berakhir.

Demikian juga kerajaan Muwahhidun, ketika wilayah kekuasaannya lepas, di Afrika bangkit Bani Abi Hafsh yang memisahkan diri dan membuat kerajaan tersendiri disana bagi keturunan-keturunan mereka di berbagai wilayahnya kemudian ketika kekuasaan mereka telah menjadi besar dan berada di puncak, maka muncul untuk menguasai kerajaan-kerajaan barat keturunan mereka, Amir Abu Zakaria Yahya bin Sultan Abu Ishaq Ibrahim, yaitu khalifah mereka yang keempat. Dia mendirikan suatu kerajaan di Bijayah dan Qasanthinah dan sekitarnya, kemudian mewariskannya kepada putra-putranya dan membagi kerajaan menjadi dua bagian kemudian mereka menguasai *Kursi Al-Khadhr* [Singgasana Hijau] di Tunisia kemudian kerajaan itu terbagi di antara keturunan mereka, namun kekuasaan itu kembali kepada mereka lagi.¹⁵⁸

4. Kejayaan Kerajaan, Perluasan Wilayah, dan Waktu Eksisnya Tergantung Pada Besar-Kecilnya Kekuatan Pengelolanya

Kekuasaan tidak terbentuk tanpa dukungan *'ashabiyah*. Orang-orang yang memiliki *'ashabiyah* itu merupakan penjaga kerajaan. Mereka harus menelusuri

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm. 519-520.

kerajaan-kerajaan bagian dan daerah perbatasan. Kerajaan yang memiliki kekuatan dan kabilah terbesar, maka dialah yang lebih kuat dan memiliki kerajaan-kerajaan bagian dan daerah lebih banyak, serta kekuasaan yang paling luas. Perhatikanlah kondisi semacam ini pada kerajaan Islam ketika Allah menyatukan bangsa Arab dengan Islam. Ketika itu jumlah personel pasukan kaum muslimin dalam perang Tabuk, yang merupakan perang terakhir yang diikuti Rasulullah SAW, hanyalah 110.000 personel, yang terdiri dari suku Mudhar dan Qahthan dan terbagi dalam pasukan kavaleri juga pasukan biasa, ditambah dengan mereka yang masuk Islam hingga Beliau wafat.

Ketika mereka mulai bergerak untuk merebut kekuasaan bangsa-bangsa lain, mereka belum memiliki tempat bertahan dan perlindungan, namun mereka mampu menembus pertahanan bangsa Persia dan Romawi, yang pada masa itu merupakan dua kekuatan super power di dunia, lalu menguasai Turki di belahan Timur Eropa dan Barbar di sebelah Barat Eropa, Quth di Andalusia, lalu berhasil meneruskan beberapa penaklukan mulai dari Hijaz hingga ke wilayah Sus yang terjauh kemudian Yaman sampai ke Turki di sebelah utara, dan mereka berhasil menguasai ketujuh daerah tersebut.

Perhatikan juga pemerintahan bangsa Shanhajah dan Al-Muwahhidun, serta Al-Ubaidi sebelumnya. Ketika Kutamah yang paling banyak mendukung pemerintahan Al-Ubaidi dibandingkan orang-orang Shanhajah dan Mushamidah, maka kerajaan mereka menjadi lebih besar. Mereka berhasil menguasai beberapa wilayah, antara lain Afrika, Maghrib, Syam, Mesir, dan Hijaz. Perhatikan juga pemerintahan Zanatah, jumlah penduduk mereka yang lebih sedikit dibandingkan

Mushamidah membuat kekuasaan mereka lebih kecil dibandingkan kekuasaan Al-Muwahhidun karena keterbatasan dan kurangnya jumlah mereka jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Al-Mushamidah sejak awalnya. Perhatikan pula situasi dan kondisi kedua pemerintahan Zanatah pada masa sekarang ini, yakni pemerintahan yang dipimpin Bani Murain dan Bani Abdul Wad. Kerajaan Bani Murain lebih kuat dan lebih luas wilayahnya daripada Bani Abdul Wad, sehingga yang pertama berkali-kali berhasil mengalahkan yang kedua. Sebuah sumber sejarah menyebutkan bahwa jumlah penduduk Bani Murain pada awal berdirinya pemerintahan mereka berjumlah 3000 jiwa, sedangkan Bani Abdul Wad berjumlah 1000 jiwa. Hal ini memberikan pengertian kepada kita bahwa ketika suatu kerajaan mencapai kemakmuran sehingga mendorong banyak orang untuk menjadi bagian dari pendukungnya, maka jumlah mereka bertambah banyak.¹⁵⁹ Dengan prosentase mengenai jumlah penduduk kerajaan yang menguasai pada awal terbentuknya, maka dapat diketahui luas wilayah suatu kerajaan dan kekuatan angkatan perang yang dimilikinya.

Adapun berapa lama kerajaan atau pemerintahan tersebut eksis, juga dapat diketahui berdasarkan perhitungan tersebut, sebab umur sesuatu yang baru dari segi daya tahannya dan daya tahan kerajaan-kerajaan pada umumnya tergantung pada *'ashabiyah* yang dimilikinya. Apabila kerajaan tersebut memiliki *'ashabiyah* yang kuat, maka daya tahannya akan kuat dan mampu bertahan lebih lama. Gambaran tepat untuk mengilustrasikan hal tersebut adalah bahwa kelemahan yang terjadi pada suatu kerajaan akan tampak pada wilayah-wilayahnya. Jika

¹⁵⁹ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*,...hlm. 274-275.

kerajaan tersebut memiliki banyak kerajaan-kerajaan bagian, maka daerah kekuasaannya akan luas dan banyak serta jauh dari pusat kekuasaan. Setiap kelemahan yang terjadi tentulah memerlukan waktu, sehingga proses kelemahan kerajaan yang besar itu memerlukan waktu yang relatif lama karena banyaknya kerajaan-kerajaan bagian dan masing-masing kerajaan bagian memerlukan waktu yang berbeda dalam proses kelemahannya. Dengan dasar ini, maka kerajaan besar tersebut memiliki masa eksis yang lebih panjang.

Bani Abbasiyah yang mengalami kelemahan pada pusat pemerintahannya dan Bani Umayyah yang bermarkas di Andalusia itu tidak segera mengalami kehancuran setelah abad ke-4. Pemerintahan Al-Ubaidi memiliki masa eksis kurang lebih 280 tahun hijriyah, sedangkan Shanhajjah lebih pendek dari itu, mulai dari ketika pemerintahan Afrika dipimpin oleh Balkin bin Ziri tahun 358 hijriyah hingga ketika orang-orang Al-Muwahhidun berhasil menguasai Qal'ah dan Bijayah tahun 557 hijriyah. Pemerintahan Al-Muwahhidun pada masa sekarang ini berumur lebih dari 270 tahun. Beginilah panjang-pendek eksisnya suatu pemerintahan tergantung pada orang-orang yang mendukungnya.¹⁶⁰

5. Pola Kemunduran Kerajaan

Kerajaan dibangun atas dua hal dasar yang tidak bisa dihindarkan. *Pertama*, adalah kekuatan dan *'ashabiyah* yang biasa disebut dengan kekuatan militer. *Kedua*, kekayaan harta yang merupakan penopang tegaknya kekuatan militer tersebut serta untuk memenuhi berbagai kondisi yang dibutuhkan oleh raja. Apabila kemunduran terjadi pada kerajaan, maka yang pertama mengalami

¹⁶⁰ *Ibid*, hlm. 275-276.

kemunduran adalah dua hal dasar ini. Kami akan menguraikan terjadinya kemunduran pada kekuatan militer dan *'ashabiyah* terlebih dahulu, kemudian kemunduran yang terjadi pada kekayaan dan pajak.

Merintis dan membangun kerajaan sebagaimana kami sampaikan hanya dapat dilakukan dengan adanya *'ashabiyah* dan bahwa haruslah ada suatu *'ashabiyah* besar yang mampu menghimpun *ashabiyah-ashabiyah* yang mengikutinya. *'Ashabiyah* besar tersebut adalah *ashabiyah* pemimpin kerajaan yang khusus terdiri dari suatu *asyirah* atau keluarga besar dan kabilah. Ketika kerajaan mengalami tabiat kekuasaan berupa kemewahan dan “memotong hidung” (memotong kekuasaan) ahli *ashabiyah*, maka pertama kali yang dipotong adalah hidung-hidung keluarga dan kerabatnya yang selama ini telah berbagi dengannya dalam membesarkan kerajaan, maka diapun bertindak sewenang-wenang dalam memutus kekuasaan mereka karena jumlah mereka yang besar. Mereka juga mengalami kemewahan lebih banyak karena kelebihan yang mereka miliki, yaitu: kekuasaan, kemuliaan dan kemenangan, maka akan mengelilingi mereka dua hal yang sebenarnya menghancurkan, yaitu: kemewahan dan pemaksaan kemudian pemaksaan itu berubah menjadi pembunuhan karena penyakit hati ketika semakin kuatnya kekuasaan pemimpin. Simpatinya kepada mereka berubah menjadi rasa khawatir pada kekuasaannya, lalu dia menangkapi mereka untuk dibunuh, dihina, dirampas kenikmatan dan kemewahan yang telah menjadi kebiasaan bagi kebanyakan mereka.¹⁶¹

¹⁶¹ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*,... hlm. 523-524.

Akibatnya binasalah mereka dan rusaklah ikatan *ashabiyah* pemimpin kerajaan terhadap mereka, yaitu: *ashabiyah* besar yang menghimpun dan diikuti *ashabiyah-ashabiyah* lain, lalu ikatan *ashabiyah* memudar, perjanjiannya melemah dan berganti dengan orang-orang kepercayaan berdasarkan aliansi manfaat dan berbagai ahli kebaikan (kalangan profesional), dan mereka ini dibuatlah suatu *ashabiyah* baru. Hanya saja *ashabiyah* ini tidaklah sekokoh *ashabiyah* sebelumnya, karena pada *ashabiyah* ini tidak terdapat unsur kekerabatan. Pemimpin kerajaan lalu terpisah dari keluarga dan para pendukungnya yang alami. Hal itu dirasakan oleh ahli *ashabiyah-ashabiyah* lain yang sebelumnya menjadi pengikut. Akibatnya mereka berani menentangnya dan menentang orang-orang kepercayaannya dengan keberanian yang bersifat alami, lalu pemimpin kerajaan menghancurkan mereka dan melanjutkan dengan membunuh satu demi satu dan mengangkat orang lain dari pejabat kerajaan pada masa pertama itu, bersama hancurnya kemewahan yang telah mereka alami, lalu kehancuran meliputi mereka karena kemewahan dan pembunuhan itu, hingga akhirnya mereka keluar dari ikatan *ashabiyah* dan memproklamkan kekuasaannya sendiri dan memberontak. Mereka melupakan rasa cinta tanah air, kemuliaan, dan kehormatan serta bersikap berani kepada para penjaga yang jumlahnya menyusut karena kondisi tersebut. Begitu pula para penjaga yang bertempat pada berbagai wilayah-wilayah terjauh dan daerah perbatasan, lalu rakyat menjadi berani menyatakan pengakuan diri di wilayah-wilayah terjauh. Para pemberontak dan pihak-pihak lain cepat-cepat menuju ke wilayah-wilayah itu. Ketika itu mereka berharap tujuan mereka berhasil, dimana warga disana

menyatakan sumpah setia kepada mereka dan terhindarnya mereka dari para petugas keamanan kerajaan. Hal itu terus berlangsung secara perlahan-lahan. Wilayah kekuasaan kerajaan menjadi sempit kemudian para pemberontak makin menyerbu mendekati pusat kerajaan.¹⁶²

Terkadang kerajaan ketika itu terbagi menjadi dua atau tiga bagian, sesuai dengan kekuatan asalnya. Kekuasaan kerajaan dipegang oleh selain ahli *'ashabiyah*-nya, namun hal itu karena ketundukan terhadap para anggota *'ashabiyah*-nya dan karena kemenangan mereka yang memang nyata. Perhatikanlah hal itu pada kerajaan Arab dalam Islam, bagaimana hal itu berlaku lebih dahulu di Andalusia, India dan China. Kekuasaan Bani Umayyah menjangkau seluruh Arab karena *ashabiyah* Bani Abdi Manaf, sehingga Sulaiman bin Abdul Malik di Damaskus telah memerintahkan untuk membunuh Abdul Aziz bin Musa bin Nushair di Cordova, maka dia pun dibunuh dan kekuasaannya tidak dikembalikan kemudian *'ashabiyah* Bani Umayyah melebur karena kemewahan yang menimpa mereka kemudian mereka pun musnah. Lalu datang Bani Abbasiyah. Mereka memperalat bala bantuan Bani Hasyim dan membunuh para Thalibiyun serta mengusir mereka, maka pudar dan leburlah *'ashabiyah* Bani Abdi Manaf. Orang-orang Arab berani pada mereka, akibatnya warga daerah-daerah jauh memisahkan diri, seperti Bani Aghlab di Afrika, warga Andalusia dan lain sebagainya, maka kerajaan pun terbagi kemudian muncul Bani Idris di Maghrib dan tampillah bangsa Barbar yang menguasai mereka demi ketundukan

¹⁶² *Ibid*, hlm. 524.

kepada *'ashabiyah* yang ada pada mereka dan demi keamanan jika para tentara atau petugas keamanan kerajaan sampai kepada mereka.

Ketika akhirnya para proklamator telah muncul, mereka lalu menguasai wilayah-wilayah jauh dan daerah terpencil dari kerajaan. Jika Pengakuan dan kekuasaan mereka disana berhasil, maka kerajaan menjadi terbagi karena hal tersebut. Kadang kondisi itu bertambah kacau ketika kerajaan bertambah pudar hingga mencapai ke pusat. Orang-orang kepercayaan menjadi lemah akibat kemewahan, lalu menjadi binasa dan lebur. Kerajaan yang telah terbagi itupun menjadi lemah secara total. Kadang-kadang masa kerajaan dapat berjalan lama setelah itu, maka dia tidak membutuhkan *'ashabiyah*, karena telah berhasil memiliki kepercayaan dalam hati warga di wilayahnya. Ini adalah ketundukan dan kepercayaan sejak bertahun-tahun, dimana tidak seorang pun dari para generasi berpikir tentang prinsip dasarnya dan tidak juga asal mulanya. Mereka tidak berpikir kecuali pasrah pada pemimpin kerajaan. Dengan begitu dia tidak lagi memerlukan kekuatan *'ashabiyah- 'ashabiyah*. Pemimpinnya merasa cukup untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mengandalkan perlindungan dari tentara dan orang yang menerima gaji. Hal itu didukung apa yang terjadi dalam hati warga secara umum, yaitu: kepasrahan. Tidak seorang pun berpikir melakukan pembangkangan atau pemberontakan kecuali bahwa mayoritas warga akan mengingkari dan menentangnya, maka dia tidak akan berhasil melakukannya meskipun berusaha keras untuk itu.

Terkadang kerajaan yang berada dalam kondisi seperti ini lebih selamat dari para pemberontak dan penentang, karena kuatnya semangat kepasrahan dan

ketundukan pada mereka, maka tidak mungkin hati menceritakan rahasianya berupa penentangan dan tidak terbersit dalam benaknya untuk menyimpang dari kepatuhan, maka ia lebih terhindar dari kekacauan dan pemberontakan yang kerap kali muncul dari *'ashabiyah-'ashabiyah* dan para keluarga, selanjutnya kekuasaan kerajaan terus seperti itu, melebur dalam dirinya sendiri, sebagaimana kondisi emosi dan watak dalam tubuh yang kehilangan makanan hingga habis pada waktu yang ditentukan.¹⁶³

Sedangkan kelemahan yang dialami kerajaan dari segi kekayaan adalah bahwa kerajaan pada awalnya adalah *badawah*, maka perwatakannya adalah kasih sayang dengan rakyat, bersikap moderat dalam pembelanjaan dan membatasi diri dari harta, oleh karena itu kerajaan menghindari untuk memperdalam masalah pajak dan menjadi pintar dalam mengumpulkan harta dan menghitung para pegawai. Ketika itu, tidak ada alasan untuk berlebihan dalam belanja. Akibatnya, kerajaan tidak membutuhkan harta yang banyak kemudian kekuasaan menjadi besar dan mendorong kepada kemewahan juga banyak belanja. Belanja-belanja sultan dan pejabat kerajaan secara umum menjadi banyak, bahkan menjalar kepada warga kota. Kenyataan itu memicu pertambahan dalam gaji-gaji tentara dan upah-upah warga kerajaan, kemudian kemewahan menjadi besar dan melahirkan sikap berlebihan dalam belanja. Hal itu juga tersebar pada rakyat, karena manusia itu cenderung mengikuti agama dan tradisi raja-rajanya. Sultan merasa perlu untuk menerapkan pungutan-pungutan atas harga-harga dan jual beli-jual beli di pasar untuk menaikkan hasil pajak. Dia berpandangan bahwa

¹⁶³ *Ibid*, hlm. 525-526.

kemewahan kota membuktikan kesejahteraan warga, di samping untuk keperluan belanja-belanja yang dibutuhkan sultan sendiri dan gaji-gaji tentaranya, kemudian tradisi-tradisi kemewahan meningkat. Akibatnya, pajak tidak lagi memadai padahal kerajaan telah serius mengeksploitasi dan memaksa rakyat yang berada dalam kekuasaannya. Pemerintah tidak segan-segan untuk mengumpulkan harta rakyat itu lewat pungutan, perdagangan, maupun uang tunai, baik dengan alasan maupun tanpa alasan.

Dalam kondisi seperti ini, tentara menjadi bersikap berani terhadap kerajaan yang telah mengalami kegagalan dan kelemahan dalam *'ashabiyah* itu. Ia mengkhawatirkan adanya ancaman seperti itu dari mereka. Sultan pun menebusnya dengan pemberian-pemberian yang memuaskan dan memperbanyak anggaran untuk mereka. Dalam kondisi kerajaan seperti ini, harta kekayaan para penarik pajak menjadi besar karena banyaknya pajak dan adanya kewenangan pada mereka serta jabatan mereka yang meluas, lalu kondisi itu mengarah mereka dengan tergabungnya harta-harta dari pajak. Pemungutan pajak merajalela di lingkungan mereka, karena satu sama lain saling bersaing dan saling dengki. Mereka akan diliputi malapetaka dan konfrontasi satu demi satu hingga kekayaan mereka hilang dan keadaan mereka menjadi lebur. Hilang pula apa yang pernah dimiliki kerajaan, yaitu: kewibawaan dan keindahan akibat ulah mereka. Ketika nikmat mereka tercabut dari akarnya, maka kerajaan akan berpindah kepada pihak lain yang memiliki kekayaan. Kelemahan pada kondisi ini juga telah menimpa angkatan bersenjata, sehingga tidak mampu serius dan kehilangan hak paksa, lalu strategi pemimpin kerajaan ketika itu adalah menangani berbagai urusan dengan

mengandalkan harta dan melihatnya lebih bernilai dibandingkan pedang, karena memang minimnya kekayaannya. Kebutuhannya kepada harta sebagai tambahan belanja-belanja dan gaji-gaji tentara menjadi besar dan tidak lagi mencukupi sebagaimana yang dia kehendaki. Kelemahan pada kerajaan semakin besar dan warga dari berbagai penjuru mulai bersikap berani pada kerajaan. Kerajaan pun terlepas simpul-simpul kekuasaannya dalam setiap tahap, mulai dari saat ini hingga berakhir dengan kehancuran dan diambil alih oleh para penuntut kemerdekaan. Jika seorang penuntut menginginkannya, maka dia dapat mengambilnya dari tangan para pejabat yang mengurusnya. Andaiapun tidak, dia menjadi lebur sendiri hingga sirna seperti sumbu lampu pada lentera yang jika telah habis minyaknya, maka akan padam dengan sendirinya.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*,... hlm. 527-528.